



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Mandailing Natal

TESIS



**FORCI NILPA DARMA
07 211 004**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2009**

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
Kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu
Apabila menetapkan hukum diantara manusia
Supaya kamu menetapkan dengan adil
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
(An-Nisaa : 58)*

*Kusimpan berjuta asa untuk menuju masa depan
Belajar untuk memahami kehidupan
Dengan taburan berbagai nuansa dan warna
Menuntut suatu kedewasaan dan kemandirian
Ujian dan cobaan sebagai hiasan
Hari ini sekeping harapan telah kuraih
Namun perjalananku masih panjang
Beribu tantangan masih harus kuhadapi*

*Ya Allah....Bersujud aku di hadapan Mu
Sebagai rasa syukurku
Atas segala nikmat dan karunia
Yang telah Engkau berikan kepadaku*

*Kupersembahkan.....
Setetes keberhasilanku ini
Buat Ayahanda Darriis Dj dan Ibunda Nursini
Sebagai buah dari doamu
Sebagai mutiara dari keringatmu
Dan sebagai permata dari air matamu
Juga adikku tersayang
Serta mereka yang kusayangi dengan "setulus
hatiku"*

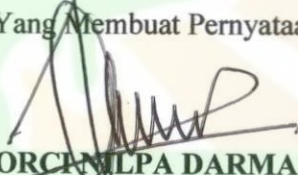
*Buat teman-temanku seperjuangan
Yang telah menanamkan benih persahabatan dan kekeluargaan
Terima kasih atas kerjasama
Dan kekompakannya selama ini*

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul :
“Pemeriksaan setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara
Perdata Di Pengadilan Negeri Mandailing Natal” adalah hasil kerja / karya saya
sendiri dan bukan / jiplakan dari hasil kerja / karya orang lain, kecuali kutipan
yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian pernyataan ini tidak benar, maka
status kelulusan dan gelar yang diperoleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 1 Nopember 2009

Yang Membuat Pernyataan


FORCINALPA DARMA, SH
07 211 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan karunia Allah Swt yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Syalawat dan salam tak lupa pula Penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa peradaban manusia dari kebodohan menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan, Penulis menyadari dengan segala kelemahan dan kekurangan penulisan tesis ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajiannya maupun menyangkut materi. Namun, berkat usaha keras dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan tesis ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama :

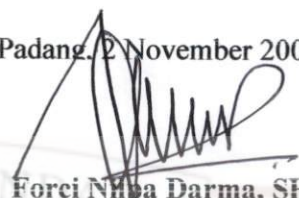
1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang beserta staf yang telah membantu kelancaran administrasi penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, serta staf pengajar yang telah memberikan pemikiran yang berharga kepada Penulis dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.

3. Bapak Dr. Ferdi. SH. MH. selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Nanda Utama. SH. MH. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dalam seminar Proposal, seminar hasil maupun ujian akhir komprehensif.
4. Bapak Prof. Sofvan Mukhtar. SH. Prof. Dr. Sofvan Thalib. SH. Prof. Dr. Yulia Mirwati. SH.CN.MH. Tasman. SH. MH. dan Bapak Bachtiar Abna. SH. MH. sebagai Dosen Penguii yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Akhir Komprehensif.
5. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Hakim-hakim, Panitera beserta Pegawai-pegawai yang telah memberikan izin dan kesediaan memberikan informasi yang Penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
6. Yang tercinta buat kedua orang tua, nenek dan adik Penulis yang telah memberikan dorongan do'a dan bimbingan serta bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Yang terbaik buat teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum, terutama Pak Partono, Pak Yarwan, Mbak Yenni Ruspa, Abang Yuhendri, Revi, Marissa, Pak Abu Zanar, Pak Edy Pramudvo, Bang Andi Aziz, serta teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu sewaktu kita kuliah, semoga kisah ini akan kita ingat selalu sebagai sekeping kisah berharga dalam hidup.

Akhir kata Penulis mohon ampun kepada Allah Swt dan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan kekhilafan yang Penulis telah

perbuat. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas
khususnya dalam pembinaan hukum nasional pada umumnya.

Padang, 2 November 2009


Forci Nipa Darma, SH
07 211 004



DAFTAR ISI

Hal

LEMBARAN PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual	11
1. Kerangka Teoretis	11
2. Kerangka Konseptual	15
F. Maetode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	20
3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	21
BAB II PEMBUKTIAN	22
A. Pengertian Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	22
B. Tujuan Pembuktian Dalam Perkara Perdata	28
C. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan Oleh Para Pihak	29
D. Pihak Yang Harus Membuktikan Dalam Persidangan Perkara Perdata.....	31

E. Penilaian Pembuktian Oleh Hakim	32
F. Beban Pembuktian Bagi Para Pihak	34
G. Alat-alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata	47
1. Surat	48
2. Saksi	55
3. Persangkaan	61
4. Pengakuan	62
5. Sumpah	67
H. Pengertian dan Pengaturan Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Kedudukan Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara Perdata	75
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Guna Mendukung Pembuktian Dalam Perkara Perdata	94
C. Kendala-kendala Yang Sering Dihadapi Dalam Pemeriksaan Setempat	99
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

B.Rv	: Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)
HIR	: Het Herziene Indonesische Reglement
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
Rbg	: RechtsReglement voor de Buitengewesten



Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Oleh

Forci Nilpa Darma

(Dibawah Bimbingan Dr. Ferdi, SH. MH dan Nanda Utama, SH. MH)

ABSTRAK

Pemeriksaan setempat sebagai salah satu bagian acara dalam pembuktian perkara perdata. Pemeriksaan setempat tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan kepastian tentang luas, batas-batas dan ukuran objek perkara, yang dalam hal ini objek perkaranya berupa tanah. Secara yuridis formil berdasarkan ketentuan Pasal 1886 KUHPerdata, pemeriksaan setempat tidak termasuk ke dalam alat bukti dalam perkara perdata. Namun, hasil dari pemeriksaan setempat itu sendiri dapat menentukan dalam Putusan Hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana kedudukan pemeriksaan setempat sebagai salah satu sarana pendukung alat bukti dalam perkara perdata. (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung pembuktian dalam perkara perdata. (3) Kendala-kendala apa yang sering dialami dalam pemeriksaan setempat.

Hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pemeriksaan setempat bukanlah merupakan alat bukti dalam perkara perdata, tetapi dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim dalam mengambil Putusan, mengabulkan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan dapat juga menentukan luas dari tanah objek perkara. Kendala-kendala yang sering ditemui dalam pemeriksaan setempat itu adalah tidak pernah dilibatkannya ahli dalam pemeriksaan setempat, juga masalah keamanan dari para petugas yang melaksanakan pemeriksaan setempat, serta sulitnya akses jalan menuju tempat objek perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses Litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat Absolut (*Ultimate Absolut*), tetapi bersifat kebenaran Relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*Probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan¹.

Menurut Krisna Harahap, prinsip umum pembuktian adalah :

Landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan kekuatan yang berlaku bagi sistem pembuktian secara umum².

Seperti kita maklumi, Hukum Acara atau Hukum Formal bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum materil. Secara formal hukum pembuktian mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam

¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika offset, Cetakan Kedua, hal. 498.

² Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif*, Bandung, Grafiti, hal.67.

Herzien Indonesis Reglement yang selanjutnya disingkat HIR dan *Rechtglement Buitengewesten* yang selanjutnya disingkat dengan Rbg, sedangkan secara materiel, hukum pembuktian itu mengatur bagaimana diterima atau tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu. Karena itu kita dapat katakan bahwa :

*Membuktikan adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan petunjuk tentang kebenaran peristiwa yang diajukan*³.

Suatu pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata, tidak bersifat **Stelsel Negative** menurut Undang-Undang (*Negatief Wettelijk Stelsel*). Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*Formeel Waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan⁴.

Jadi pembuktian secara yuridis, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum⁵.

³ *Ibid*

⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 498.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 129.

Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat, meskipun hal itu bohong atau palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu, tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan⁶.

Meskipun hakim berpendapat kebenaran dalil gugatan yang diakui tergugat itu setengah benar atau setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan.

Sikap demikian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan :

“Tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil Putusan berdasarkan kebenaran formil”.

Selanjutnya Pasal 163 HIR/283 Rbg, menyatakan :

“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Ini dikenal dengan asas “Actori Incumbit Probation”.

⁶Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.9.

Jadi pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan sesuatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangkal oleh pihak lawan.

Tiap pembuktian, walau dengan alat bukti yang lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan⁷. Pembuktian adalah setiap usaha yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan ini adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Pengadilan Negeri berwenang untuk membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya. Pengadilan Negeri memberikan bimbingan dalam hal mengajukan pembuktian, sehingga pembuktian itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Kalau seseorang penggugat hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan hakim di persidangan agar hakim dapat secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri, barang yang telah dibeli yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian. Setiap alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak kepada

⁷Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.40.

pihak lain, yang terakhir ini harus diberi kesempatan untuk menilai dan mengajukan pendapatnya, terhadap alat bukti.

Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, karena tidak mungkin dibawa ke muka hakim di persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu itu. Kecuali itu dapat pula diajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Masih ada kemungkinan lain untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu, yaitu apabila peristiwa *a* itu sukar pembuktiannya, untuk membuktikannya maka dibuktikanlah adanya peristiwa *b*. dengan berhasil membuktikan peristiwa *b* itu, maka peristiwa *a* dianggap terbukti. Ini pada hakekatnya hanyalah merupakan persangkaan-persangkaan (*Vermoedens praesumptiones*) : itikad buruk seseorang misalnya, sukar untuk dibuktikan ; hal itu dibuktikan dengan membuktikan peristiwa yang lain.

Dalam prakteknya, sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya pembentuk Undang-Undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai

pembuktian, terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, misalnya hakim terikat dalam penilaiannya (Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)), sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, Pasal 309 Rbg, Pasal 1908 KUHPerdata).

Pada umumnya sepanjang Undang-Undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanyalah *Judex Factie* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh Penggugat, kecuali ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Jadi bukti itu dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus sudah dianggap sudah pasti atau benar.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan dalam Undang-Undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, Pasal 1866 KUHPerdata) ialah : *bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah*.

Sekarang ini memang sudah ada pembaruan mengenai jenis atau bentuk alat bukti yang disebut Pasal 1886 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, seperti data Elektronik sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Hal ini timbul karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan terus dan sekaligus memperkenalkan jenis atau bentuk alat bukti baru yang lebih canggih.

Dalam praktek di persidangan perkara perdata yang objeknya menyangkut masalah tanah, untuk memperjelas fakta peristiwa maupun objek barang perkara, terutama untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara. peradilan sering menerapkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (RV), dengan jalan memerintahkan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*). Hal ini dikuatkan juga dengan dikeluarkannya surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat dengan SEMA, yaitu SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Seringkali terjadi dalam praktek peradilan, pada saat Putusan akan dieksekusi, objek barang perkara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *non executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan.

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat, didasarkan pada perintah Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Perintah menurut Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, secara samar dituangkan dalam bentuk Putusan Sela, dan dalam Pasal 211 Rv, perintah penguangan dalam Putusan Sela (*Interlocutoir Vonnis*) ditentukan secara tegas, akan tetapi di dalam prakteknya, pelaksanaan pemeriksaan setempat dilakukan tanpa ada perintah hakim dalam bentuk Putusan sela, hanya didasarkan

pada perintah hakim yang disampaikan secara lisan saja di persidangan, setelah mendengar permohonan para pihak yang disampaikan secara lisan juga di persidangan.

Dalam prakteknya, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bisa saja dilakukan sebelum masuk kepada pemeriksaan alat-alat bukti, dan ada juga pemeriksaan setempat itu dilakukan setelah pembuktian selesai dilakukan, baik itu pembuktian dari pihak penggugat maupun pembuktian dari pihak tergugat, dan terhadap pemeriksaan setempat yang dilakukan itu, setiap Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri karena memang belum ada petunjuk baku kapan sebaiknya pemeriksaan setempat itu dilakukan.

Secara formil, pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 Rbg. Akan tetapi, di dalam prakteknya di pengadilan, pemeriksaan setempat ini dapat menentukan apakah gugatan seseorang itu dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hal ini tentu kontradiktif dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang alat bukti di atas. Misalnya, dalam pembuktian di persidangan, bukti-bukti yang diajukan penggugat telah dapat dibuktikan, ternyata sewaktu diadakan pemeriksaan setempat di tempat objek perkara, ternyata objek perkara tersebut tidak sesuai dengan lokasi, luas, dan batas-batas sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan penggugat, hal ini tentunya akan menjadi dilema dalam pembuktian.

Bahkan, para Sarjana pun berbeda pendapat tentang kedudukan pemeriksaan setempat ini dalam pembuktian perkara perdata. Dalam bukunya M. Yahya Harahap mengatakan bahwa :.....*Hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saja bagi hakim*⁸”, namun di buku lain karangan Krisna Harahap mengatakan :... *bahwa pemeriksaan setempat tersebut merupakan salah satu alat bukti yang terdapat diluar Pasal 164 HIR*⁹”.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat itu, Majelis Hakim seringkali menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala, baik itu kendala yang berasal itu dari tahap proses pelaksanaan pemeriksaan setempat itu sendiri, maupun kendala yang timbul dari masing-masing pihak, baik penggugat dan tergugat.

Sehubungan dengan beberapa latar belakang permasalahan yang sering Penulis temui dalam prakteknya, maka mendorong Penulis untuk mengangkatnya dalam sebuah Karya Ilmiah dengan judul **“PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI SALAH SATU PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan judul diatas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal.779.

⁹Krisna Harahap, *Op.Cit*, hal. 106.

1. Bagaimana kedudukan pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung pembuktian dalam perkara perdata?
3. Kendala-kendala apa yang sering ditemui dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan logis yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan pembahasan-pembahasan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat ilmiah. Tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung pembuktian dalam perkara perdata.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang sering ditemui dalam pemeriksaan setempat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian yang Penulis lakukan ini, diharapkan akan dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dan bidang

hukum khususnya, baik itu kegunaan secara teoritis dan prakteknya bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek.

Manfaat yang bersifat teoretis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum acara perdata yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.

Manfaat yang bersifat praktis, bahwa hasil penelitian ini diharapkan nantinya kita dapat :

1. Memberikan jalan yang akurat terhadap permasalahan yang sering ditemui dalam pemeriksaan setempat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat pula mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
3. Mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.

E. KERANGKA TEORETIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoretis

Dalam menilai pembuktian hakim dapat bertindak bebas atau diikat oleh Undang-Undang, maka timbullah pertanyaan : sampai berapa jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atau para pihak dalam pembuktian peristiwa dalam sidang? Tentang hal ini ada 3 teori¹⁰ :

- a. Teori pembuktian bebas.

¹⁰Krisna Harahap, *Op.Cit*, hal.46.

a. Teori pembuktian bebas.

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga nilai pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya.

b. Teori pembuktian negatif.

Menurut teori harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu :

“Bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian”.

Contoh : Pasal 169 HIR / Pasal 306 Rbg.

Keterangan seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum.

c. Teori hukum positif.

Menurut teori ini, selain larangan terhadap hakim, perlu diberi perintah. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat.

Pasal 165 HIR / Pasal 285 Rbg, menyatakan :

“Akta otentik, suatu surat yang dibuat menurut Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang-orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja”

Kalau pada dasarnya siapa yang mengemukakan sesuatu, yang harus dibebani dengan pembuktian, maka di dalam prakteknya pembagian dalam pembuktian itu baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan¹¹.

Dalam ilmu pengetahuan terdapat pula beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, yaitu¹² :

- a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*).

Menurut teori ini :

“Maka siapa yang mengemukakan sesuatu harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau menyangkalnya”.

Dasar hukum daripada teori ini ialah pendapat bahwa hal-hal yang negatif tidak mungkin dibuktikan (*negative nont sunt probanda*). Peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan kepada seseorang. Teori *“bloot affirmatief”* ini sekarang telah ditinggalkan.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

¹¹Putusan MA, 15 Maret 1972 No. 549 K/Sip/1971, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972*, hal. 108.

¹²Asser – Anema – Verdam, hal.64, sebagaimana dikutip Sudikono Mertokusumo dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, hal.143-147.

b. Teori hukum subjektif.

Menurut teori suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif atau bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku sesuatu harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan antara peristiwa yang bersifat umum atau peristiwa-peristiwa khusus.

c. Teori hukum objektif.

Menurut teori, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

d. Teori hukum publik.

Menurut teori ini maka mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori hukum acara.

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut¹³.

2. Kerangka Konseptual

2.1. Yang dimaksudkan dengan *Pemeriksaan Setempat* atau *descente* ialah :

“Pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa”¹⁴.

2.2. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim

¹³Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, hal. 46.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal.194.

melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.

Pendapat lain mengatakan bahwa, Alat bukti adalah :

“Alat atau benda yang secara tertulis disebutkan atau diakui oleh Undang-undang sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum”¹⁵.

2.3. Pendukung yang dimaksudkan disini adalah hal-hal yang dapat mendukung atau memperkuat dalam pembuktian perkara perdata selain diluar alat-alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2.4. Menurut Wiryono Prodjodikoro berpendapat bahwa :

“Hukum Acara Perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum perdata. Hukum Acara Perdata dikenal juga dengan nama Process Rechts atau Formeel Rechts yang bersifat Privaatrechts (tergantung pada perseorangan)”¹⁶.

2.5. “Membuktikan” mengandung beberapa pengertian¹⁷ :

Kata membuktikan dikenal dalam arti *logis* atau *ilmiah*.

¹⁵Pendapat **Hwian Christianto, SH**, *http.www. Alat Bukti Dokumen Elektronik Dalam Perkara Perdata*, terakhir kali dibuka tanggal 24 Oktober 2009.

¹⁶**Krisna Harahap**, *Op.Cit*, hal.1.

¹⁷**Sudikno Mertokusumo**, *Op.Cit*, hal.134-136.

Membuktikan disini berarti :

Memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.

2.6. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional. Disini membuktikan berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian relatif yang sifatnya yang mempunyai tingkatan¹⁸ :

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

¹⁸ *Ibid.*

2.7. Pembuktian secara yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa, mengkualifikasinya, dan kemudian mengkonstituir, maka tujuan pembuktian adalah Putusan Hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun Putusan itu diharuskan objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak mensyaratkan adanya keyakinan.

Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim.

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163

HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa yang menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ini berarti bahwa kedua belah pihak, pihak penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya”.

Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan, sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus pula dikalahkan.

Kalau hakim ingin memeriksa barang tetap yang sukar untuk mengajukannya ke persidangan, maka hakim melakukan pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat atau *descente* adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Metode Pendekatan Normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan kajian-kajian terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya

dengan kasus-kasus dengan objek penelitian, yaitu mengenai Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Penelitian yang dilakukan dalam Penelitian Hukum Normatif ini adalah Penelitian Kepustakaan dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah, dengan melakukan :

- a. Studi Dokumen, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul penelitian ini, antara lain :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai Pemeriksaan Setempat Sebagai Salah Satu Pendukung Alat Bukti Dalam Perkara Perdata, antara lain :
 - HIR dan Rbg.
 - B.Rv.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, mempelajari berbagai literatur (buku, makalah, jurnal), kasus-kasus yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk bahan hukum primer dan

sekunder yang berupa Kamus Hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

- b. Wawancara (interview), yaitu merupakan alat pendukung dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan bersifat semi struktur atau gabungan, maksudnya ada daftar pertanyaan dan tidak pula terikat akan pertanyaan yang ada itu. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap beberapa orang hakim (sekitar 5 orang hakim) Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang telah diwawancarai dan berpengalaman dalam melakukan Pemeriksaan Setempat sebagai salah satu Acara pembuktian yang dilalui dalam pembuktian perkara perdata, khusus objek perkaranya berupa tanah.

3. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik atau pola Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini, didasarkan pada metode kualitatif. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat-pendapat para pakar dan teori yang mendukung penelitian ini dengan prakteknya di persidangan, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu konsep, yang mana parameter fokus hasil penelitian ini dapat dibuktikan secara pasti keberadaannya.

BAB II

PEMBUKTIAN

A. PENGERTIAN PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolute (*Ultimate truth*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan¹⁹.

Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor²⁰ :

1. Faktor sistem adversarial (*adversarial system*). Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan lawan sesuai dengan proses adversarial (*adversarial proceeding*).
2. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran diluar apa yang diajukan dan disampaikan para

¹⁹Jhon J. cound, Cs, *Civil Procedure : Cases & Material*, West Publishing, St. Paul Minn, 1985, sebagaimana dikutip Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hlm.867.

²⁰Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 496.

pihak dalam persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perkara perdata sesuai dengan sistem adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah kearah sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan dan sumpah). Dalam hal itu, sekalipun kebenarannya diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilainya²⁰.

3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli (*not analyzed and appraised by experts*).

Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi dan prasangka yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur dugaan atau prasangka, faktor kebohongan, unsur kepalsuan, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran yang hakiki. Maka untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengandung kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dapat dipercaya (*inherently unreliable*) dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga (*eliminating worthless evidence*)²¹.

²⁰Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm.9

²¹Jhon J. Cound, cs, op.cit., hlm. 868.

Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir. Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*Ius curia novit*). Ini merupakan asas hukum acara. Maka oleh karena itu hakim harus mempunyai pengetahuan tentang hukum.

Meskipun peristiwa atau fakta itu disajikan oleh para pihak, hakim harus pasti tahu akan peristiwa yang diajukan itu. Ia harus mengkonstatirnya, yang berarti bahwa ia harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya.

Dalam beberapa hal, maka peristiwanya tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim. Ini disebabkan karena :

1. Peristiwa memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam hal-hal di bawah ini peristiwanya tidak perlu dibuktikan :
 - a. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa ada pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar

serta diluar hadirnya pihak tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim.

- b. Dalam hak tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
 - c. Dengan telah dilakukan sumpah decisoir, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa, yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
 - d. Telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam hal bantahan, kurang cukup atau dalam hal diajukan referte, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian²².
2. Hakim secara ex officio dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa itu ialah :
- a. Apa yang dikenal dengan peristiwa notoir. Peristiwa notoir adalah kejadian atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan dan mengenal zamannya, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut, atau peristiwa yang dapat diketahuinya dari sumber-sumber yang umum tanpa mengadakan penelitian yang berarti dan yang memberi kepastian yang cukup untuk digunakan sebagai alasan

²² Asser – Anema – Verdam, *Handleiding tot de beoefening van het NederlandsBurgelijk Rechts*, van Bewijs, hlm. 29.

pembenar untuk suatu tindakan yang bersifat kemasyarakatan yang serius²³. Lazimnya peristiwa notoir ini diartikan sebagai peristiwa yang diketahui oleh umum. Oleh karena itu hakim yang berpendidikan tinggi dan sudah tentu dianggap berpengetahuan luas pula, harus juga tahu akan peristiwa notoir ini, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

- b. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di persidangan di muka hakim yang memeriksa perkara. Kejadian-kejadian prosesuil ini dianggap diketahui oleh hakim, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya pihak tergugat tidak datang, bahwa pihak tergugat mengakui gugatan, bahwa pihak penggugat mengajukan alat bukti.
3. Pengetahuan tentang pengalaman. Yang dimaksudkan pengetahuan tentang pengalaman ini adalah kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum. Pengetahuan tentang pengalaman ini tidaklah termasuk hukum, karena tidak bersifat normatif, tetapi merupakan pengalaman semata-mata. Sebaliknya bukan pula merupakan peristiwa tertentu, melainkan merupakan kejadian yang ajeg. Jadi merupakan ketentuan umum berdasarkan pengalaman manusia dan yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan.

Secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam HIR dan Rbg, sedangkan secara materiel, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian

²³ *Ibid*, hlm. 30.

dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu.

Membuktikan mengandung beberapa pengertian :

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti *logis* atau *ilmiah*. Membuktikan disini berarti bahwa memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu *axioma*, yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian itu berlaku bagi setiap orang.
2. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti *konvensional*. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut sebagai *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut sebagai *conviction raisonnee*.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.

Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian tidak bersifat langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian oleh orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menerapkan bahwa sesuatu telah terbukti.

B. TUJUAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Sudah menjadi *Communis Opinio* seperti yang telah diketengahkan di muka, bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang mengkonstatir peristiwa, mangkualifisirnya, dan kemudian mengkonstituirnya, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan tersebut harus objektif, namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana

yang mensyaratkan adanya keyakinan dan pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.

Berbeda dengan tujuan pembuktian ilmiah ialah bahwa pembuktian ilmiah adalah suatu konstataasi peristiwa dan bukan semata-mata untuk mengambil kesimpulan atau putusan. Tujuan pembuktian yuridis adalah untuk mengambil putusan yang definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus objektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum, kesamaan perlakuan terhadap para pihak.

C. HAL-HAL YANG HARUS DIBUKTIKAN PARA PIHAK

Seperti yang telah diuraikan di muka, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*Ius curia novit*). Ketentuan ini dapat disimpulkan dari Pasal 178 ayat 1 HIR / Pasal 189 ayat 1 Rbg dan Pasal 50 ayat 1 Rv.

Jadi hakim dalam proses perdata terutama harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim guna dasar pertimbangan daripada putusannya. Peristiwa-peristiwa itu masih harus disaring oleh hakim, harus

dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) bagi hukum dan mana yang tidak (*Irrelevant, immaterial*). Peristiwa yang *relevant* itulah yang harus ditetapkan dan oleh karena itu harus dibuktikan.

Tidaklah *relevant* bagi hukum apakah penggugat pada waktu mengadakan perjanjian tersebut memakai baju batik dan tergugat sedang merokok. Yang *relevant* bagi hakim ialah apakah benar-benar pada waktu dan tempat tertentu telah terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga terjadilah perjanjian hutang piutang tertentu antara kedua belah pihak.

Apakah hak dapat dibuktikan? Dari Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 BW telah jelas, bahwa : “*Siapa mengakui mempunyai hak harus membuktikannya*”.

Telah merupakan pendapat umum serta Yurisprudensi juga, hak dapat pula dibuktikan. Bukankah tujuan daripada pembuktian itu untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak, suatu hubungan yang sering tidak dapat dilihat atau diamati oleh panca indera. Pertanyaan tersebut diatas timbul oleh karena para Sarjana Hukum dalam abad yang lalu berpendapat bahwa yang dapat dibuktikan hanya dapat diamati dengan panca indera saja²⁴.

Dari peristiwa itu yang harus dibuktikan adalah kebenarannya. Sering dikatakan, bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari hakim adalah kebenaran *formil*, berlainan dengan dalam acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran *materiil*. Ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari

²⁴HR 7 April 1932, NJ 1932, 1613 dalam Pitlo, *Bewijs en Verjaring*, hal.22

kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara : jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi pada luas daripada pemeriksaan oleh hakim.

Pasal 178 ayat 3 HIR / Pasal 189 ayat 3 Rbg, melarang hakim untuk menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Kalau objek pembuktian Yuridis adalah peristiwa konkret individual dan bersifat historis, kerana peristiwa yang dibuktikan pada umumnya adalah peristiwa yang sudah terjadi di waktu yang silam, maka objek pembuktian ilmiah adalah dalil-dalil. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembuktian ilmiahpun objeknya adalah peristiwa konkret individual seperti misalnya seorang dokter yang harus mendiagnosa suatu penyakit.

D. PIHAK YANG HARUS MEMBUKTIKAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

Yang mencari kebenaran dan menetapkan atau mengkonstatir peristiwanya adalah hakim. Peristiwa itu ditetapkan atau dikonstanstir oleh hakim dianggapnya terbukti benar. Kalau hakim yang harus mengkonstatir peristiwanya, siapakah yang wajib membuktikannya? Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan tidak lain adalah para pihak, yaitu para penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim. Sesuai Pasal 163 HIR / 283 Rbg / Pasal 1865 BW : *“barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak,....harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.*

Jadi pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangkal oleh pihak lawan. Disamping itu Pengadilan Negeri berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.

Setiap alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain (pihak kedua), maka pihak yang kedua ini harus diberi kesempatan untuk menilai dan mengajukan pendapatnya, terhadap alat bukti itu.

Seperti diketahui, bahwa beban pembuktian harus diberikan secara adil. Apabila tidak dapat dianggap pelanggaran hukum yang dapat memaksa Mahkamah Agung membatalkan Putusan *judex factie*. Salah satu teori beban pembuktian yakni *process rechtelijk*, menentukan bahwa :

- a. Mereka yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama.
- b. Mereka harus diperlakukan oleh hakim dengan cara yang sama, tidak boleh berbeda.
- c. Kemungkinan menang untuk pihak-pihak yang berperkara sama besar.

E. PENILAIAN PEMBUKTIAN OLEH HAKIM

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, maka pembuktian itu masih harus dinilai. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak berhak menilainya. Sebaliknya pembentuk undang-undang dapat

menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertentu, misalnya hakim terikat dalam penilaiannya (Pasal 165 HIR / pasal 285 Rbg / Pasal 1870 BW). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi saja, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR / Pasal 309 Rbg / Pasal 1908 BW)²⁵.

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang wenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah *judex factie* saja, sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi²⁶.

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, bukti itu dinilai lengkap dan sempurna, apabila hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

Tiap pembuktian, walau dengan bukti lengkap sekalipun, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidakbenarannya peristiwa yang diajukan oleh pihak lawan. Bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hal.140.

²⁶M.A. 29 Juli No. 7 K/Sip/1967, *J.I. Pen. 11/69*, hal.93.

atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan ini adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Pasal 177 HIR / Pasal 314 Rbg dan Pasal 1936 BW tentang sumpah tidak memungkinkan bukti lawan.

F. BEBAN PEMBUKTIAN BAGI PARA PIHAK

Berbicara mengenai beban pembuktian, menyangkut langsung dengan masalah pembagian beban pembuktian. Masalah apa saja yang dibebankan pembuktiannya kepada penggugat, dan bagian mana yang menjadi beban tergugat. Supaya tidak terjadi dalam praktek pembebanan yang merugikan salah satu pihak, harus dipedimani prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Tidak Bersikap Berat sebelah

Hakim dalam memikulkan pembebanan pembuktian harus bersikap :

1. Adil, sesuai prinsip *fair trial*, dan
2. Tidak berat sebelah atau tidak bersikap parsial, tetap imparsialitas²⁷.

Hakim tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak, tetapi secara bijaksana membaginya sesuai dengan sistem hukum pembuktian dengan cara memberi perhitungan yang sama kepada pihak yang berperkara²⁸. Oleh karena itu, pembagian beban pembuktian dialokasikan sesuai dengan mekanisme yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu contoh bagaimana mengalokasikan beban pembuktian yang adil dan proporsional, dapat dilihat dalam Putusan MA No. 1490

²⁷Subekti, *op.cit.*, hlm.15.

²⁸Teguh Samudra, *hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 15.

K/Pdt/1987²⁹. Dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain. Selanjutnya dijelaskan, dalam hal penggugat mendalilkan bahwa penguasaan dan status tergugat di atas tanah terperkara berdasarkan pinjam, dan sebaliknya tergugat mendalilkan tanah terperkara telah dibeli dari penggugat, maka dalam kasus yang demikian sesuai dengan sistem beban wajib bukti (*stelplicht*), kepada masing-masing pihak dibebani :

1. Kepada penggugat membuktikan dalil pinjam yang diajukannya (tergugat menguasai berstatus sebagai peminjam).
2. Kepada tergugat wajib membuktikan dalil beli (tanah telah dibeli dari penggugat).
- b. Menegakkan Resiko Alokasi Pembebanan

Seperti yang dijelaskan, bahwa pembebanan pembuktian dilakukan dengan fair trial dan imparsial sesuai dengan mekanisme alokasi yang digariskan sistem hukum pembuktian. Dalam mekanisme alokasi tersebut melekat resiko yang harus ditanggung akibatnya oleh masing-masing pihak.

Barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti

²⁹ Tanggal 31-8-1988, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting*, Edisi II, MA RI, Jakarta, 1992, hlm. 51.

yang relevan atas hal tersebut. Dengan adanya resiko yang harus ditanggung akibatnya apabila gagal membuktikan masalah yang dialokasikan kepada pihak yang berperkara, maka sebaiknya jangan sampai terjadi kecerobohan pembagian alokasi. Apabila dipikulkan beban pembuktian yang tidak menurut hukum kepada suatu pihak, sudah barang tentu yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dan kegagalan untuk membuktikannya. Dan kekeliruan ini akan mendatangkan resiko yang tidak adil kepadanya.

Akan tetapi, kalau pengalokasian beban pembuktian dilakukan secara adil (*fair*) dan tidak memihak (*imparsial*), hakim harus tegas menegakkan risiko atas kegagalan membuktikan apa yang harus dipikulkan kepada suatu hak. Ketegasan penegakan resiko itu dapat dilihat dalam Putusan MA No. 3565 K/Pdt/1984³⁰. Sesuai dengan dalil gugatan, keberadaan tergugat diatas tanah terperkara adalah sebagai peminjam atas izin penggugat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan sistem beban pembuktian, penggugat harus membuktikan dalil tersebut. Akan tetapi penggugat tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan tidak benar keberadaan tergugat menguasai tanah itu sebagai penumpang.

Penerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktian merupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena dia masalah yuridis, penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat Kasasi ke MA. Artinya apabila PN atau PT salah meletakkan pembagian pembebanan pembuktian, pihak

³⁰Tanggal 14-1-1986 Jo PT Jambi No. 11/1983, 12-12-1983, Jo PN. Bangka No. 17/1981, 9-12-1981.

yang merasa dirugikan dapat menjadikan kesalahan penerapan itu sebagai alasan kasasi. Jika ternyata benar terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai penerapannya, hal itu akan dijadikan dasar oleh MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan PT dalam tingkat banding, apabila PN dalam tingkat pertama salah menerapkan beban pembuktian.

Kesalahan penerapan pembagian beban pembuktian itu telah dipertimbangkan dalam Putusan MA No. 578 K/1984³¹, yang antara lain mengatakan PT telah salah menerapkan hukum pembuktian atas alasan karena karena tidak sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak sesuai dengan dalil gugatan atau dalil bantahan. Jika diperhatikan dengan seksama dalil gugatan menyatakan tanah perkara berasal dari ibunya tergugat yang dipinjamkan kepada mertua para tergugat. Sebaliknya, para tergugat mengajukan dalil bantahan bahwa tanah perkara mereka peroleh dengan jalan tukar menukar.

Ditinjau dari segi ketentuan undang-undang dan praktek, telah terjadi perkembangan pedoman pembagian beban pembuktian. Patokannya tidak lagi semata-mata didasarkan pada Undang-Undang.

a. Pedoman Umum Berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai pedoman atau Aturan Umum digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUHPerdara, yang berbunyi :

³¹Tanggal 28-8-1985, Jo PT. Ujung Pandang No. 113/1983, 1-9-1983, Jo PN. Watampone no. 16/1981, 11-4-1981.

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Inti pokok dari pasal-pasal di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu.
- Sebaliknya, siapa yang membantah orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.

Atau secara teknis yutisial, dapat diringkas bahwa ;

- Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ; dan
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.

Itulah pedoman pembebanan pembuktian yang digariskan dalam undang-undang. Pedoman ini, merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian. Dalam penerapan pembagian beban pembuktian tersebut, diperlukan apabila para pihak yang berperkara saling mempersengketakan dalil gugatan yang diajukan penggugat. Akan tetapi jika para pihak memperoleh kesepakatan atau pihak

lain mengakui apa yang disengketakan, pedoman pembagian beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata.

Dalam *Common Law*, asas atau pedoman pembagian beban pembuktian yang diterangkan diatas dirumuskan dalam kalimat singkat : “*he who asserts must prove*” siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Pedoman ini disebut standar *burder of proof* yang berlaku sebagai *General Rule*. Dengan demikian, *he who assert must prove*, merupakan pedoman atau prinsip yang kuat dalam pembebanan pembuktian.

Prinsip yang digariskan *Common Law* di atas, sama dengan yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdata, Pasal 163 HIR. Hukum mewajibkan beban pembuktian bagi seseorang yang membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan yang dikemukakannya. Prinsip itu merupakan pangkal dan patokan pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata, yakni siapa yang mengemukakan sesuatu wajib membuktikannya.

b. Beban Pembuktian Berdasarkan Teori Hak.

Dalam perkembangan, muncul teori pembagian beban pembuktian yang disebut teori hak atau teori hukum objektif.

Menurut teori hak, ada dua faktor pokok yang dijadikan pedoman penerapan pembagian beban pembuktian.

(1) Pembebanan Bertitik Tolak dan Mempertahankan Hak.

Menurut teori ini, setiap perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan untuk mempertahankan hak. Kalau begitu, pedoman pembebanan

pembuktian harus bertitik tolak dari kepentingan mempertahankan hak tersebut. Dengan demikian prinsip yang harus dipahami :

- a) Siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak tersebut.
- b) Berarti yang lebih dulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak penggugat, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya di dalam perkara yang bersangkutan.

Sikap yang demikian, tersirat dalam Putusan MA No. 2786 K/Pdt/1985³².

Dikemukakan, ditinjau dari sistem dan prinsip pembebanan wajib bukti, penggugat yang wajib lebih dahulu membuktikan transaksi yang terjadi bukan jual beli, tetapi sewa menyewa.

(2) Tidak Semua Fakta Wajib Dibuktikan.

Menurut teori hak, dalam pembebanan pembuktian tidak semua fakta mesti dibuktikan, dengan acuan sebagai berikut :

- a) Mewajibkan membuktikan segala fakta adalah irrasional.

Tidak mesti semua hal dibuktikan. Hak atau fakta yang mesti dibuktikan adalah fakta atau dalil yang berkenaan dengan hak. Mewajibkan beban pembuktian mesti membuktikan segala hal, berarti pembuktian mengarah kepada wajib bukti yang tidak terhingga batasnya. Baik secara teori dan praktek, tidak ada seorangpun yang mampu membuktikan segala hal yang melekat dalam suatu perkara. Atas dasar itu, mewajibkan beban pembuktian mesti membuktikan segala hal, dianggap tidak realistic.

³²Tanggal 23-1-1985, Jo PT DKI No. 338/1982, 31-11-1983, Jo PN Jak-tim No. 214/1981, 2-6-1982.

b) Fakta yang wajib dibuktikan.

Seperti yang diuraikan diatas, beban pembuktian tidak boleh mengarah kepada pembuktian yang tidak terhingga batasnya. Cara penerapan pembebanan pembuktian yang rasional dilakukan dengan membedakan fakta yang melekat pada perkara yang bersangkutan.

c. Beban Pembuktian Berdasarkan Teori Hukum.

Titik tolak teori hukum yang disebut juga teori hukum objektif dalam pembagian beban pembuktian, dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara hakim melaksanakan hukum. Melaksanakan hukum sama artinya menjalankan peraturan perundang-undangan. Setiap terjadi sengketa di pengadilan :

- Hakim harus melaksanakan hukum atau undang-undang ;
- Pada umumnya, hukum atau peraturan perundang-undangan, telah menentukan fakta yang wajib dibuktikan pada setiap peristiwa ;
- Bertitik tolak dari prinsip tersebut, fakta yang wajib dibuktikan merujuk kepada syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, cukup membaca dan mencari dalam peraturan perundang-undangan fakta apa yang dibebankan pembuktiannya.

Dengan demikian, segala persoalan beban pembuktian dipecahkan melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh mengenai beban perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal tersebut telah mengatur sendiri unsur-unsur apa saja yang memenuhi syarat PMH :

- Ada perbuatan melawan hukum,
- Perbuatan atau kealpaan terjadi karena kesalahan pelaku,
- Perbuatan itu mendatangkan kerugian pada orang lain (penggugat).

Dapat dilihat, Pasal 1365 KUHPerdara, telah menentukan sendiri-sendiri unsur-unsur terjadinya PMH. Maka sesuai dengan teori hukum, fakta yang harus dibuktikan oleh tergugat adalah hal-hal yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal yang bersangkutan.

Terhadap teori hukum, muncul kritik. Teori ini dianggap realistik, bahkan kemungkinan besar tidak memberi pedoman yang jelas antara pembebanan pembuktian, atas alasan tidak semua masalah hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan terlampaui banyak corak ragam dan perubahan peraturan perundang-undangan.

d. **Pembebanan Pembuktian Berdasarkan Kepatutan.**

Pembebanan pembuktian ini disebut juga Teori Kepatutan berdasarkan hukum acara. Pedoman yang diberikan teori tersebut, memikilkan beban pembuktian yang seimbang untung dan ruginya kepada para pihak. Terkadang pengertian kepatutan dapat dijadikan untuk menambah atau memperkuat ketentuan hukum. Misalnya, dengan memberi penegasan bahwa ketentuan pasal undang-undang yang

bersangkutan sesuai dengan kepatutan dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatutan tersebut memperkuat ketentuan hukum tersebut. Akan tetapi kadang-kadang, kepatutan yang diterapkan menyingkirkan ketentuan undang-undang yang berlaku, apabila ketentuannya dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Bahkan dalam kompromi maupun dalam perdamaian, para pihak menyingkirkan atau mengesampingkan hukum berdasarkan kepatutan yang mereka dianggap adil.

Pedoman yang dijadikan patokan pembebanan pembuktian berdasarkan teori tersebut tidak berpegang teguh secara kaku kepada landasan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR, dengan titik tolak beban pembuktian melalui pendekatan Fleksibel dan mengesampingkan Pasal 163 HIR, apabila Penerapannya Mengakibatkan Ketidapatutan.

Menurut teori ini, hakim harus mengeyampingkan aturan pembagian beban pembuktian yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR, apabila penerapan ketentuan itu dalam keadaan konkret menimbulkan ketidakadilan atau ketidakmampuan.

Dalam keadaan yang seperti itu, hakim harus :

- Berpaling dari ketentuan yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR.
- Sebagai penggantinya, diterapkan pembebanan wajib bukti berdasarkan kepatutan menurut pertimbangan atau perasaan kepatutan hakim.

Dalam pemikiran teori kepatutan bertitik tolak dari kenyataan, bahwa dalam suatu perkara yang disidangkan di pengadilan berhadapan dua pihak (penggugat dan tergugat) yang sama-sama memenangkannya. Sedangkan hakim adalah pihak ketiga yang bersikap tidak memihak (*imparsial*). Dalam kedudukan yang demikian, hakim memberi kesempatan yang sama dengan cara memikulkan beban pembuktian yang berpedoman kepada beratnya dalil yang hendak dibuktikan. Hakim harus membagi beban pembuktian sedemikian rupa agar betul-betul seimbang, sehingga pihak yang dibebani wajib bukti, tidak lebih ringan dari pihak lawan apabila dia mengajukan pembuktian sebaliknya.

Secara sederhana dapat dikemukakan suatu asas penerapan Teori Kepatutan :

- Siapa yang mengemukakan suatu hubungan hukum telah putus, dianggap layak dan patut meletakkan beban wajib bukti kepadanya untuk membuktikan peristiwa itu ;
- Siapa yang menguasai sesuatu, tidak layak dan tidak patut dibebani wajib bukti untuk membuktikan haknya atasnya, tetapi yang patut dibebani wajib bukti adalah pihak yang menyangkal hak tersebut.

Apa benar kritik yang mengatakan penerapan pembebanan pembuktian berdasar kepatutan, akan melemahkan penegakan kepastian hukum? Terhadap kritik ini, Pitlo berpendapat sebaliknya. Menurut beliau “.....dalam soal-soal dimana Undang-Undang sedikit sekali memberi kepastian, pendapat Hakim tentang kepatutan merupakan tiang terakhir yang menunjang kepastian hukum”.

Bertitik tolak dari pedoman ketentuan umum yang digariskan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR, dihubungkan dengan Teori Hukum Subjektif dan Objektif, serta Teori Keputusan, telah muncul beberapa prinsip penerapan pembagian beban pembuktian dalam praktek peradilan.

1) Yang Harus Dibuktikan Hal yang Positif

Sesuatu hal dikatakan bersifat positif, apabila di dalamnya terdapat fakta, atau didalamnya terkandung peristiwa atau kejadian. Misalnya penggugat mendalilkan tergugat memutuskan kontrak secara sepihak. Dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa pemutusan kontrak oleh tergugat. Oleh karena itu, harus dibuktikan, dan yang dibebani wajib bukti adalah penggugat. Sebaliknya, apabila tergugat mengajukan bantahan (*Counterclaim*) terhadap peristiwa itu, kepadanya dipikulkan wajib bukti untuk membuktikan bantahan itu.

Pada dasarnya, prinsip ini tidak jauh berbeda dengan pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR. Perhatikan Putusan MA No. 162 K/Sip/1955. Dalam perkara ini, tergugat ditugaskan dan diberi hak oleh Penggugat memungut sewa beberapa pintu toko, mengatakan bahwa toko-toko tersebut selalu menghasilkan sewa. Pengadilan berpendapat bahwa tergugat telah mengajukan hal yang positif (tidak selalu menghasilkan sewa). Oleh karena itu kepadanya dibebani wajib bukti dengan pertimbangan bahwa pihak yang mengatakan suatu keadaan yang tidak biasa, harus membuktikan hal atau keadaan yang tidak biasa tersebut.

2) Hal Yang Negatif tidak Dibuktikan

Suatu hal atau keadaan disebut bersifat negatif apabila :

- Hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan.
- Dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (*unapprropriate*) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya.

Sehubungan dengan itu, dianggap tidak patut membebani wajib bukti kepada tergugat mengenai hal negatif, karena tidak mungkin dapat membuktikan hal yang tidak diketahui atau diperbuatnya.

Mengenai hal yang bersifat negatif banyak dijumpai dalam kasus perkara. Penerapan yang melarang pembebanan dipikulkan kepada pihak lawan mengenai hal yang bersifat negatif pada dasarnya masih dalam kerangka pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR. Hanya kedalamnya ditambah azas kepatutan dengan jalan membebaskan pihak yang mengajukan hal negatif dari beban wajib bukti.

3) Pembebanan Secara Proporsional

Dasar landasan penerapan itu masih bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR, tetapi diperluas dengan asas kepatutan

sesuai dengan berat ringannya beban pembuktian yang dihadapi para pihak.

G. ALAT-ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Dalam hal membuktikan suatu peristiwa, ada beberapa cara yang dapat ditempuh.

Kalau seorang penggugat hendak membuktikan suatu peristiwa tertentu, maka ia dapat mengajukan peristiwa tersebut di hadapan hakim di persidangan agar hakim secara langsung dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri : barang yang telah dibeli yang tidak memenuhi kualitas sesuai dengan perjanjian.

Apabila suatu peristiwa yang akan dibuktikan itu tidak mungkin dihadapkan di muka hakim di persidangan, karena tidak mungkin dibawa di muka hakim di persidangan atau peristiwa tersebut termasuk dalam masa lampau, sehingga secara langsung tidak dapat dilihat atau didengar oleh hakim, maka penggugat dapat mengajukan sepucuk surat kepada hakim yang isinya menerangkan tentang adanya atau pernah adanya peristiwa tertentu itu.

Kecuali itu dapat pula diajukan seseorang yang dapat menerangkan kepada hakim di persidangan, bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti

dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 284 R.Bg / 164 HIR), antara lain :

1. Surat (Pasal 165-169 HIR / Pasal 1867-1894 BW) ;

Alat bukti tertulis atau surat merupakan curahanhati atau pikiran seseorang. Hal ini membedakannya dengan benda-benda lainnya. Misalnya saja, catatan kuliah, catatan perjalanan, dan sebagainya.

Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuigingsstukken*). Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (*geschrift, writings*), tetapi sebagai benda untuk meyakinkan (*demonstratif evidence*) saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri misalnya.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi *akta otentik* dan *akta dibawah tangan*, yang untuk lebih lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Akta, yang terdiri Akta Otentik dan Akta di Bawah tangan.

Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak. Dibuat sejak semula dengan tujuan dijadikan sebagai bukti. Fungsi tanda tangan disini, untuk *mengindividualisir* sebuah akta. Membedakannya dengan akta yang lain. Jadi tidak cukup hanya dengan menuliskan nama yang bersangkutan saja dalam suatu akta, karena penulisan nama tersebut tidak akan menunjukkan cirinya yang khas. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat *diidentifikasi* dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok tersebut tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

Yang dimaksud dengan *penandatanganan* adalah membubuhkan nama dari si penanda tangan, sehingga membutuhkan *paraf*, yaitu singkatan dari tanda tangan saja dianggap belum cukup³⁴. Nama itu harus ditulis dengan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.

³⁴M.A. 4 Februari 1970, No. 499 K/Sip/1970, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969 – 1972 I*, hlm. 113.

Mengenai *facsimile* (cap tanda tangan) sepanjang dibubuhkan sendiri oleh yang bersangkutan atau dengan pihak yang berwenang, dipersamakan dengan tanda tangan, hanya tidak dapat dibedakan apakah cap tanda tangan tersebut dibubuhkan sendiri oleh yang bersangkutan atau tidak, sedangkan tanda tangan yang dibubuhkan pada akta di bawah tanda tangan dengan perantaraan kertas karbon hanya berlaku sebagai tanda tangan apabila pasti si Penanda Tangan menginginkan demikian³⁵.

Pengesahan sidik jari dan tanda tangan oleh Notaris atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dikenal dengan nama *waarmerking*. Jadi *waarmerking* adalah pengesahan semua tanda tangan atau sidik jari dalam surat di bawah tanda tangan oleh Notaris atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, misalnya Ketua Pengadilan Negeri, Bupati dan Walikota.

Secara teoritis apa yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. *Sejak semula dengan sengaja* berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. Dikatakan *secara resmi* karena tidak dibuat secara dibawah tangan.

³⁵Putusan Hooqe Raad 25/6-1943

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg menyebutkan Akta Otentik yaitu:

“Semua akta yang dibuat oleh Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya, dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang diberitahukan yang erat hubungannya dengan pokok daripada akta”.

Jadi akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang disebut di dalam perihal pokok soal dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila hal tersebut mempunyai hubungan langsung dengan pokok persoalan.

Dengan bukti yang cukup sempurna diartikan bahwa isi akta otentik yang bersangkutan oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan perlawanan. Jadi hakim harus mengakui apa yang tertulis dalam akta selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang bukan oleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang. Kecuali itu yang namanya akta otentik itu dibuat oleh atau dihadapan *openbare ambtenaren* yang oleh Soebekti diterjemahkan dengan *“pegawai-pegawai umum”*. Untuk tidak menimbulkan kerancuan dengan pegawai negeri kata

openbare ambtenaar, yang oleh Soebekti diterjemahkan dengan pegawai-pegawai umum selanjutnya diterjemahkan dengan pejabat umum oleh karena pejabat umum bukanlah pegawai negeri yang tunduk pada peraturan kepegawaian.

Otentik tidaknya suatu akta (otentisitas) tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja. Disamping itu caranya membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebagai keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi di hadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti daripada apa yang terjadi di hadapannya saja.

Oleh karena akta otentik itu pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi daripada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri. Jadi dianggaplah bahwa

akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Selanjutnya akta di bawah tanda tangan tidak diatur di dalam HIR, tetapi dalam Stbl 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura. Untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 s/d 305 Rbg.

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan Pejabat, seperti Notaris. Akta dibawah tanda tangan ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik, apabila tanda tangan yang tercantum disitu, diakui oleh penandatangan.

Lebih jauh membandingkan antara akta otentik dan akta di bawah tanda tangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akta otentik

- Daya pembuktian keluar. Surat yang kelihatan seperti akta otentik akan diberlakukan sebagai akta otentik terhadap setiap orang. Ini berarti bahwa tanda tangan pejabat yang ada disana, dianggap asli.
- Daya pembuktian formil. Para pihak dan pejabat menerangkan bahwa mereka telah membuat suatu persetujuan yang dituangkan dalam akta yang bersangkutan. Pihak ketiga dapat berpegang kepada ketentuan tersebut.
- Daya pembuktian materiel. Para pihak menjelaskan bahwa apa yang tertuang di dalam akta tersebut adalah sebenarnya.

2. Akta dibawah tanda tangan

- Daya pembuktian keluar. Pihak harus membuktikan keaslian tanda tangan akta yang digunakannya sebagai bukti. Apabila berhasil dibuktikan, barulah pembuktian *formil* dan *materiel* dibuktikan.
- Daya pembuktian formil. Penandatanganan menjelaskan keaslian tanda tangannya dalam hal pembuktian.
- Daya pembuktian materiel. Isi akta dianggap benar bagi setiap orang, untuk keperluan siapa akta itu diberikan. Akta ini mempunyai daya pembuktian bebas, untuk kepentingan siapa saja.

Fungsi akta

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 BW tentang *perjanjian pemborongan*, Pasal 1767 BW tentang *perjanjian hutang piutang dengan bunga* dan Pasal 1851 BW tentang *perdamaian*. Sedangkan yang disyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah Pasal 1171 BW tentang *pemberian hipotik*, Pasal 1682 BW tentang *schenkin*.

Disamping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Dari defenisi yang telah diketengahkan di muka jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya

suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Kekuatan fungsi akta

Fungsi terpenting daripada akta adalah sebagai alat bukti. Tentang kekuatan pembuktian akta ini dapat dibedakan antara 1. Kekuatan pembuktian lahir, 2. Kekuatan pembuktian formil, 3. Kekuatan pembuktian materiil.

2. Saksi (Pasal 169-172 HIR / Pasal 1895-1912 BW) ;

Dalam Hukum Acara Perdata pembuktian dengan saksi mempunyai arti penting, terutama dalam membuktikan perjanjian-perjanjian berdasarkan hukum Adat. Seperti dimaklumi di dalam Hukum Adat karena perjanjian seringkali dibuat berdasarkan kepercayaan, sulit bagi kita menemukan surat-surat perjanjian yang sengaja dibuat untuk maksud untuk pembuktian. Oleh karena itu dalam hal ini kesaksian mempunyai peranan yang penting.

Saksi-saksi ini ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang akan dibuktikan di muka sidang. Ada pula yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan, misalnya menyaksikan suatu pembagian warisan dan sebagainya.

Pasal 1907 BW menyatakan bahwa pendapat atau perkiraan-perkiraan yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah suatu kesaksian. Ini berarti bahwa seorang saksi haruslah menerangkan tentang apa yang dilihat atau yang dialaminya sendiri. Di samping itu, kesaksian tersebut harus disertai dengan

alasan-alasan bagaimana saksi mengetahui hal tersebut. Jadi saksi dilarang menarik kesimpulan, karena itu adalah tugas hakim.

Pasal 169 HIR : *Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum.*

Kalimat **tidak dapat dipercaya dalam hukum** tidaklah sekali-kali dimaksudkan bahwa keterangan seorang saksi saja harus disamakan dengan sama sekali tidak ada bukti. Anggapan seolah-olah untuk pembuktian harus dikuatkan minimal 2 (dua) orang saksi, tidaklah benar. Tetapi Pasal 169 HIR itu dapat diartikan bahwa kekuatan bukti yang diperoleh dari seorang saksi saja, tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang cukup atau lengkap oleh hakim. Akan tetapi apabila menurut pertimbangan hakim keterangan dari seorang saksi saja sudah dianggap memadai, karena dapat dipercaya, didukung bukti-bukti lainnya yang syah, keterangan dari saksi yang seorang itu dapat dianggap sebagai bukti yang lengkap. Berlainan dengan bukti surat, bukti saksi tidaklah merupakan bukti yang menentukan.

Selama seorang hakim belum yakin betul mengenai kebenarannya bukti saksi boleh diterima sebagai suatu kenyataan. Walaupun diperkuat dengan keterangan beberapa puluh orang saksi, suatu dalil tidaklah dapat dikatakan telah terbukti sepanjang hakim tidak percaya terhadap kejujuran para saksi tersebut. Pembuktian berdasarkan keterangan dari seorang saksi itu dibenarkan pula oleh undang-undang yakni Pasal 170 HIR, atau Pasal 307 Rbg, yakni mengenai pembuktian berantai terhadap peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri.

Dalam hukum pembuktian kita juga mengenal pula apa yang dinamakan *Testimonium de auditu* atau kesaksian dari hasil pendengaran, saksi dari orang lain. Ia tidak mendengar atau mengalaminya sendiri. Ia hanya mendengar peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dari orang lain.

Sejauh mana nilai kesaksian *de auditu* sebagai bukti saksi? Pendapat lama menyatakan bahwa keterangan seorang saksi yang memberikan kesaksian *de auditu* tidak ada harganya sama sekali. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali. Akan tetapi keterangan yang demikian itu dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Berdasarkan hal ini, pendapat yang menyatakan bahwa saksi *de auditu* sama sekali tidak berarti adalah keliru, karena kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber pengakuan.

Pasal 145 HIR, menyatakan :

1. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yakni :
 - a. Keluarga sedarah dan semenda menurut ketrunan yang lurus dari salah satu pihak ;
 - b. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai ;
 - c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun ;
 - d. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang ;

2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang suatu perjanjian pekerjaan ;
3. Hak untuk mengundurkan diri memberikan kesaksian dalam perkara tersebut dalam ayat diatas ini tidak berlaku untuk orang-orang yang disebutkan pada Pasal 146 ayat 1 dan 2.
4. Pengadilan Negeri berkuasa memeriksa diluar sumpah anak-anak atau orang gila yang kadang-kadang mempunyai ingatan yang terang seperti yang disebut dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai sebagai penjelasan semata-mata.

Kemudian menurut Pasal 146 ayat (1) HIR yang oleh mengundurkan diri sebagai saksi, adalah :

1. Saudara laki-laki dan semenda perempuan, ipar perempuan dari salah satu pihak.
2. Keluarga laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau isteri salah satu pihak.
3. Sekalian orang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatannya yang syah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Keterangan lain kecuali dari saksi yang dapat dijadikan alat bukti walaupun menyimpang dari Pasal 164 HIR adalah keterangan ahli atau juga dikenal sebagai saksi ahli.

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim tentu saja tidak dapat menguasai atau mengetahui seluruh persoalan, sedangkan di lain pihak ia diwajibkan memutuskan perkara dan tidak boleh menolak perkara tersebut. Karena itu ia dapat menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu yang biasanya hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu saja. Bahkan mengenai hukum pun hakim dapat meminta bantuan seorang ahli, umpamanya untuk mengetahui hukum adat di suatu tempat, Hakim dapat mendengar keterangan dari Kepala Adat yang bersangkutan.

Pasal 154 HIR menyatakan ;

- (1) Jika Pengadilan Negeri menimbang bahwa perkara itu dapat lebih terang, jika diperiksa atau dilihat oleh seorang ahli, maka dapatlah ia mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua belah pihak maupun karena jabatannya.*
- (2) Dalam hal demikian, ditentukanlah hari persidangannya supaya pada hari itu ahli yang bersangkutan memberi keterangannya, baik dengan surat maupun dengan lisan dan meneguhkan keterangan itu dengan sumpah.*
- (3) Orang tidak dapat diangkat jadi ahli yaitu orang tidak boleh didengar sebagai saksi.*

- (4) *Pengadilan Negeri sekali-kali tidak diwajibkan menurutkan perasaan ahli itu, jika perasaan itu berlawanan dengan keyakinannya.*

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, dengan sungguh-sungguh hakim Hakim harus memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Cara hidup kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Kesaksian Beberapa Orang

Pasal 307 R.Bg / 170 HIR :

“Jika kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri yang dikemukakan oleh beberapa orang tentang beberapa kejadian, boleh menguatkan suatu perkara yang tertentu, maka diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk memperhatikan kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri itu menurut keadaan”.

Syarat Kesaksian

Pasal 308 R.Bg / 171 HIR :

1. Tiap-tiap kesaksian harus menyebut segala sebab pengetahuan saksi.

2. Perasaan atau persangkaan istimewa, yang terjadi karena kata akal, bukan kesaksian.

Pasal 309 R.Bg / 172 HIR :

Dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya ; persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diselidihkan ; segala sebab yang boleh jadi ada pada saksi untuk mengemukakan perkara dengan cara begini atau begitu ; perikehidupan, adat dan martabat saksi, dan pada umumnya semua hal yang dapat menyebabkan saat itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.

3. Persangkaan (Pasal 173 HIR / Pasal 1915-1922 BW) ;

Tentang pengertian persangkaan banyak terdapat salah pengertian. Adakalanya persangkaan itu dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri atau sebagai suatu dasar pembuktian atau suatu pembebasan pembebanan pembuktian.

Kalau pembuktian secara yuridis itu merupakan persangkaan yang meyakinkan, maka persangkaan itu merupakan pembuktian sementara.

Pada hakekatnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terkenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Pasal 1915 BW menyebutkan bahwa yang berwenang menarik kesimpulan itu adalah :

1. Hakim – *Faitelijk / Rechtelijke Vermoedens Praesumptiones Factie*.
2. Undang-undang – *Wettelijke / Rechtvermoedens Praesumptiones Juris*.

Apabila yang menarik kesimpulan itu adalah Hakim, maka persangkaan itu dinamakan **Persangkaan Hakim**. Apabila yang menarik kesimpulan itu undang-undang, maka dinamakan **Persangkaan Undang-Undang**.

Persangkaan sangat berguna apabila dalam suatu perkara sangat sukar diperoleh saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang akan dibuktikan. Misalnya perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinahan. Sangat sulit mendapat saksi yang melihat sendiri peristiwa itu.

Sangka yang tidak beralasan pada suatu ketentuan undang-undang yang nyata, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan putusannya jika sangka itu penting, seksama tertentu dan bersesuaian.

4. Pengakuan (Pasal 174-176 HIR / Pasal 1923-1928 BW) ;

Ketentuan yang mengatur perihal pengakuan (*bekentenis*) dapat kita temukan dalam Pasal 174, 175, dan 176 HIR atau Pasal 1923-1928 BW. Sebenarnya tidaklah tepat kalau kita mengatakan bahwa pengakuan itu adalah alat bukti.

Logikanya, apabila dalil suatu pihak telah diakui oleh pihak lain, maka dalil itu tak perlu dibuktikan lagi. Sebab yang harus dibuktikan itu hanyalah dalil-dalil yang disangkal oleh pihak lawan saja.

Pasal 311 R.Bg / 174 HIR menyatakan bahwa : *“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna dan memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu”*.

Dalam hal ini kita harus membedakan pengakuan (*bekentenis*) di satu pihak dan **membenarkan** (*erkentenis*) di lain pihak.

Dalam perkara perdata, pengakuan dari Tergugat mempunyai arti bahwa ia menerima sepenuhnya segala yang diajukan oleh Penggugat. Sedangkan membenarkan suatu hal atau beberapa hal berarti bahwa Tergugat menerima suatu hal atau beberapa hal tersebut, akan tetapi dilain pihak Tergugat menolak dan menyangkal hal-hal lainnya.

Ditilik dari tempat dimana pengakuan itu diberikan, pengakuan dapat dibagi 2 :

1. Pengakuan yang dilakukan di depan siding (gerechtelijke Bekentenis)
Pasal 174 HIR / 1925 BW.
2. Pengakuan yang diberikan di luar siding.

Seperti yang dikemukakan dalam Pasal 174 HIR, pengakuan yang diberikan di muka persidangan merupakan bukti yang cukup untuk memberatkan

orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri maupun oleh orang lain yang sengaja dikuasakan untuk itu. Pasal 175 HIR menyebutkan : bahwa *“.....maka diserahkan kepada pertimbangan dan waspadanya hakim di dalam menentukan gunanya suatu pengakuan lisan, yang dilakukan di luar hukum”*.

Pasal ini mengatur pengakuan yang dilakukan diluar persidangan. Tetapi yang diatur hanyalah pengakuan lisan saja. Pasal ini tidak memuat pengakuan tertulis di luar persidangan. Pengakuan lisan diluar persidangan, masih harus dibuktikan kebenarannya oleh karena hakim tidak mendengar sendiri pengakuan itu. Jadi sebenarnya, nilai pengakuan di luar persidangan sama saja dengan dugaan. Menurut Pasal 173 HIR, sesuatu dugaan saja tidak dapat dianggap sebagai suatu bukti yang cukup. Karena itu Pasal 175 HIR ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 173 HIR tersebut.

Menurut Pasal 175 HIR Hakim leluasa memberikan penghargaan sebagai bukti yang cukup terhadap pengakuan secara lisan tersebut. Oleh karena itu Pasal 175 tidak menyinggung mengenai pengakuan secara tertulis, maka pengakuan tersebut harus dilihat di dalam rangka ketentuan-ketentuan tentang bukti surat padaa umumnya.

Pengakuan tertulis diluar hukum hanya dapat membuktikan bahwa tergugat betul telah melakukan pengakuan itu, akan tetapi tidak dapat dijadikan bukti langsung. Surat pengakuan ini hanya merupakan dugaan baru dapat dianggap sebagai bukti apabila dugaan itu bersesuaian dengan dugaan-dugaan

launnya. Karena itu, surat pengakuan yang ditulis diluar persidangan hanya merupakan dugaan dan tidak dapat dianggap bukti yang cukup.

Akan halnya dengan pengakuan yang diberikan di muka sidang, baik oleh orang yang bersangkutan sendiri maupun kuasanya, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat. Hal ini berarti bahwa hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang diakui itu adalah benar, meskipun semuanya belum tentu benar. Oleh karenanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan oleh Hakim.

Pengakuan di depan sidang tidak boleh ditarik kembali, akan tetapi apabila pengakuan itu diberikan karena kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi, larangan tersebut dianggap tidak berlaku. Apabila dilihat dari sudut BW, pengakuan yang diberikan di muka sidang merupakan persangkaan undang-undang.

Salah satu persangkaan undang-undang yang disebut dalam ketentuan Pasal 1916 BW adalah pengakuan di depan sidang.

Menurut Pasal 1921 BW alinea 2 BW pembuktian melawan persangkaan undang-undang tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu pengakuan atas dalil-dalil yang dikemukakan pihak lawan membawa arti bahwa kebenaran gugatan berdasarkan dalil-dalil yang telah diakui itu seketika menjadi terbukti dan oleh karena gugatan harus dikabulkan.

Dalam hukum pembuktian, pengakuan dan tidak disangkalnya dalil-dalil pihak lawan, mempunyai kekuatan bukti yang sama. Artinya dalil tersebut dianggap terbukti, sehingga gugatan harus dikabulkan oleh hakim.

Pasal 178 HIR menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak berwenang menerima sebahagian saja dan menolak sebahagian yang lain, sehingga merugikan orang yang mengaku itu. Yang demikian itu hanya boleh dikabulkan kalau orang yang berutang dengan maksud akan melepaskan dirinya menyebutkan perkara yang terbukti tidak benar”.

Pasal 176 HIR mengatur tentang pengakuan yang tidak dapat dipisahkan (*onsplitsbare bekentenis / Aven*), karena itu pembuktian harus diterima secara bulat.

Akan tetapi Pasal 176 HIR menyimpang dari Pasal 165 HIR, yang menetapkan bahwa tiap-tiap penyangkalan atas gugatan, Penggugat dapat mengajukan lagi bukti-bukti untuk memperkuat gugatannya. Penggugat dapat mengajukan bukti yang menyatakan bahwa keterangan atas pengakuan yang diajukan oleh tergugat tidak benar. Apabila penggugat berhasil dalam pembuktiannya, maka ia dapat meminta kepada hakim agar diadakan pemisahan terhadap pernyataan tergugat. Berdasarkan bukti yang berhasil itu penggugat dapat pula meminta kepada hakim agar tergugat dihukum atas dasar pengakuannya yang telah dibersihkan dari keterangan tambahan yang tidak benar itu. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Pasal 176 HIR (1924 BW) pada dasarnya mengatur tentang pembagian bahan pembuktian.

Pembuktian dapat dibagi dalam 3 macam ;

- a. **Pengakuan murni / bulat** – sepenuhnya sesuai dengan dalil lawan.
- b. **Pengakuan dengan kualifikasi** (*Gequali ceerdebekentenis*) – disertai sangkalan terhadap sebahagian dari lawan.
- c. **Pengakuan dengan klaussule** (*geclausuleerdebekentenis*) – disertai keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan.

5. Sumpah (Pasal 177 HIR / 1929-1945 BW) ;

Yang dimaksud dengan sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa.

Sumpah itu ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. **Sumpah pihak**, atau sumpah *decisoir*, yaitu sumpah yang dibebankan oleh satu pihak yang berperkara kepada pihak lain.
2. **Sumpah jabatan**, atau sumpah *suppletoir*, yaitu sumpah yang menurut jabatan yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara.

Menurut Pasal 177 HIR dengan jelas dinyatakan bahwa sumpah itu, baik *decisoir* maupun *suppletor* merupakan bukti yang mutlak, artinya setelah pihak yang bersangkutan mengangkat sumpah, maka hakim harus menetapkan keterangan untuk apa pihak itu telah bersumpah sebagai telah cukup terbukti.

Macam-macam sumpah menurut HIR :

1. Sumpah *Suppletoir* (sumpah pelengkap, tambahan). Pasal 155 HIR / 182 Rbg / 1940 BW.
2. Sumpah *Aestimator* (sumpah penaksir). Pasal 155 HIR / 1940 BW.
3. Sumpah *Decisoir* (sumpah pemutus). Pasal 156 HIR dan 1930 BW.

Jika tidak ada alat-alat bukti lain maka sumpah pelengkap dijadikan sebagai alat pembukti. Sesungguhnya pembukti ini adalah alat pembukti darurat.

Apabila hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi diperoleh pembuktian dengan cara yang lain, maka ia diperkenankan akan tetapi tidak diwajibkan untuk menggunakan sumpah pelengkap. Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Ia tidak akan menyuruh salah satu pihak untuk mengangkat sumpah ia yakin bahwa yang bersangkutan akan melakukan sumpah palsu. Apabila ia tidak yaakin akan kejujuran kedua belah pihak, Hakim sebaiknya tidak menggunakan upaya sumpah ini. Ia dapat menolak saja gugatan yang diajukan. Hakim dapat mengajukan sumpah pelengkap, dalam hal :

1. Tuntutan tidak terbukti secara sempurna.
2. Tuntutan tidak sama sekali tidak terbukti.

Sumpah Penaksir, adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi.

Karena sering simpang siur, soal ganti rugi ini biasanya harus dipastikan dengan pembuktian. Sumpah penaksir ini bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

Pasal 156 HIR, 1930-1939 KUHPerdara :

- (1) Jika sekalipun tidak ada suatu keterangan untuk meneguhkan tuntutan atau pembalasan atas tuntutan itu, maka boleh juga salah satu pihak meminta kepada pihak lain agar bersumpah dihadapan hakim, supaya karena sumpah itu berhubungan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak itu sendiri yang kepada sumpahnya akan bergantung keputusan perkara itu.
- (2) Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka bolehlah pihak yang tidak mau bersumpah mengembalikan sumpah itu kepada lawannya.
- (3) Barangsiapa disuruh bersumpah tetapi enggan bersumpah sendiri atau enggan mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, ataupun barangsiapa menyuruh bersumpah tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan ia enggan bersumpah maka ia harus dikalahkan.

Sumpah yang diatur di dalam Pasal 156 HIR dan Pasal 1930 BW ini adalah sumpah pemutus atau sumpah yang menentukan karena tidak alat bukti lain.

Sumpah ini tidak diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak, akan tetapi dibebakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

Perbedaan lainnya dengan sumpah pelengkap atau penaksir sumpah pemutus dapat dibebankan kepada pihak lainnya, sekalipun tidak ada tanda-tanda pembuktian sama sekali. Jadi penyelesaian perkara benar-benar tergantung dari sumpah pemutus ini.

Orang yang didalam suatu perkara telah mengangkat sumpah yang dibebankan, atau ditolak kepadanya oleh lawannya, atau dibebankan kepadanya oleh hakim, orang itu tidak dapat diminta bukti lain akan meneguhkan apa yang dibenarkannya dengan sumpah.

H. PENGERTIAN DAN PENGATURAN PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI SALAH SATU PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Dalam pembuktian perkara perdata, memeriksa barang bergerak oleh hakim pada umumnya tidak menemui kesulitan. Barang tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk diperiksa dalam hubungannya dengan suatu perkara. Tidak demikian halnya barang tetap atau tidak bergerak.

Apabila hakim ingin memperoleh kepastian mengenai sesuatu hak dan tidak hanya menggantungkannya kepada keterangan saksi-saksi atau surat, maka persidangan haruslah dipindahkan ke tempat barang tetap itu berada untuk mengadakan pemeriksaan setempat atau yang disebut juga dengan *descent*.

Seandainya pemeriksaan setempat itu dilakukan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri tertentu, maka harus dilakukan delegasi atau limpahan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri dimana objek perkara itu terletak.

Sering terjadi ketidaksesuaian ukuran objek perkara dalam dalil gugatan dengan bukti-bukti saksi dan surat di persidangan. Sebagaimana diketahui, bahwa penggugat dalam membuat gugatannya, untuk menentukan batas-batas, luas dan ukuran objek perkara yang akan digugatnya, tanpa terlebih dahulu melakukan pengukuran langsung terhadap tanah yang menjadi objek perkara yang diklaim oleh penggugat adalah miliknya, sedangkan objek perkara itu sekarang dikuasai oleh pihak tergugat, karena untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang dikuasai oleh orang lain itu bukan pekerjaan yang mudah, karena bisa-bisa pihak tergugat merasa tidak senang karena tanahnya mau diambil oleh orang lain dan terjadilah perbuatan pidana, seperti penganiayaan yang sering dilatarbelakangi oleh masalah tanah, seperti yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal³⁵. Maka, berdasarkan pembuktian di persidangan, apabila Majelis Hakim belum memperoleh kepastian (kaburnya) tentang objek perkara, maka hakim yang menyidangkan perkara tersebut dapat melakukan pemeriksaan setempat.

Sebelum kita memberikan pengertian Pemeriksaan Setempat, terlebih dahulu harus kita perhatikan ketentuan Pasal 153 HIR yang mengatur tentang Pemeriksaan Setempat, menyatakan bahwa :

- (1) *Jika dipandang perlu dan berfaedah, Ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan Panitera pengadilan*

³⁵Wawancara **Khamozaro Waruwu**., Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sekarang dimutasikan ke Pengadilan Negeri Dumai.

akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.

(2) Panitera pengadilan hendaklah membuat Berita Acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu³⁶.

Dari bunyi Pasal diatas, Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), yang berarti :

- Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di tempat objek barang perkara.
- Persidangan di tempat itu, bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek itu di tempat barang itu terletak.
- Dan yang melakukan persidangan di tempat itu, bisa salah seorang atau dua orang Anggota Majelis Hakim yang bersangkutan, dibantu oleh seorang Panitera.

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Setempat atau *descente* adalah pemeriksaan mengenai objek perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh kepastian mengenai gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

³⁶Engelbrechts, **Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI**, Internusa, Jakarta, 1989, hlm. 721.

Selanjutnya di dalam Rbg, pengaturan pemeriksaan setempat ini diatur dalam Pasal 180 HIR yang terdiri dari 3 ayat. Substansinya sama dengan ketentuan Pasal 153 HIR. Kelebihannya, terdapat pada ayat (3), yang mengatur pendelegasian wewenang pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri di tempat objek perkara terletak.

Tujuan dari pemeriksaan setempat itu sendiri, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa tersebut dapat diukur jumlah dan kualitasnya.

Jadi pemeriksaan setempat ini bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi, tetapi pemeriksaan oleh hakim karena jabatannya, oleh karena pemeriksaan yang bersifat pribadi oleh hakim itu tidak boleh dijadikan bukti.

Kemudian, untuk menghindari sering terjadinya kesalahan dalam eksekusi terhadap objek barang sengketa nantinya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disingkat dengan SEMA, yaitu SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, karena sering terjadi dalam praktek peradilan, pada saat Putusan hendak dieksekusi, objek barang perkara batas-batas dan ukurannya tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan *Non Executable*, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena barang yang hendak dieksekusi tidak jelas dan pasti.

Apa yang dikemukakan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang **Pemeriksaan Setempat** tersebut, sejalan dengan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984, yang menurut Putusan ini menyatakan bahwa :

“Hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan.

Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah/objek terperkara, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara defenitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi rill atas Putusan yang dijatuhkan”.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI SALAH SATU PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA

Pemeriksaan setempat sebagai salah satu Acara dalam pembuktian perkara perdata mempunyai peranan yang penting bagi hakim dalam mengambil suatu Putusan dalam hal objek perkara tersebut menyangkut masalah tanah. Kedudukan pemeriksaan setempat dalam pembuktian perkara perdata, apakah masuk ke dalam alat bukti dalam pembuktian perkara perdata, masih belum ada kesatuan pendapat diantara para Ahli Hukum. *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa pemeriksaan setempat termasuk ke dalam alat bukti dalam pembuktian perkara perdata yang diatur diluar Pasal 164 HIR, yang dapat digunakan bagi hakim untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa seperti yang dikemukakan oleh Krisna Harahap dan Sudikno Mertokusumo.

Pendapat yang kedua, seperti yang dikatakan Yahya Harahap yang mengatakan bahwa secara formil tidak termasuk alat bukti. Namun demikian, pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa¹.

Kemudian kalau kita cermati pula seperti yang ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa :

¹Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Jakarta, hal.779.

“Jika dipandang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh mengangkat satu atau dua orang Komisaris yang dengan bantuan Panitera Pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim”.

Dari ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan keterangan bagi hakim.

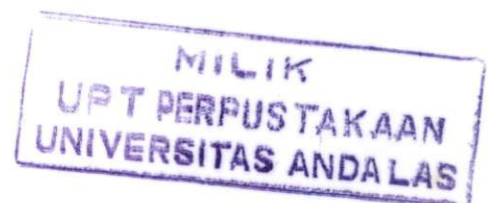
Pendapat yang saling bertentangan, seperti dikemukakan dalam Arrest Hogeraad tahun 1873 yang menyatakan bahwa :

Meskipun, pemeriksaan setempat itu tidak dimuat di dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg, 1866 BW) sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakekatnya adalah sebagai alat bukti². Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Kalau kita perhatikan Putusan Hooge Raad tersebut di atas, di satu sisi dinyatakan bahwa pemeriksaan setempat itu hakekatnya adalah sebagai alat bukti, akan tetapi disisi lain, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, apabila diserahkan kepada pertimbangan hakim, bisa saja hakim menilai bahwa pemeriksaan setempat tersebut merupakan suatu alat bukti, dan dan disisi lain hakim menilai pemeriksaaan setempat tersebut dapat hanya dapat dijadikan sebagai keterangan saja.

Seperti yang telah dinyatakan dalam Bab sebelumnya, bahwa secara *yuridis formil*, hasil pemeriksaan setempat bukanlah termasuk alat bukti, karena

²HR 24 Januari 1873, W 3554, Asser – Anema – Verdam, hal. 484 ; sebaliknya Pitlo berpendapat lain.



tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata, atau Pasal 283 Rbg. Oleh karena itu, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Hal ini diperkuat dengan latar belakang dilakukannya pemeriksaan setempat yang berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, baik Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) Rbg, dan Pasal 211 Rv, menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim.

Kemudian, kalau kita berpatokan pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR diatas, maka dapatlah kita nyatakan bahwa pemeriksaan setempat itu bukanlah termasuk ke dalam alat bukti dalam pembuktian dalam perkara perdata, hanya sebagai keterangan bagi hakim untuk jelas dan pastinya tentang objek perkara.

Kalau kita perhatikan dengan cara seksama kata-kata "*jika dipandang perlu atau faedahnya*" artinya pemeriksaan setempat bukanlah suatu keharusan bagi hakim untuk melaksanakannya. Artinya, bisa dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim, apakah dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat untuk membuat jelas tentang keadaan, lokasi, batas dan ukuran dari objek barang sengketa, karena bisa saja dalam suatu perkara perdata yang menyangkut masalah tanah, diantara para pihak, baik penggugat maupun tergugat sendiri, tidak ada mempermasalahkan mengenai batas-batas, lokasi dan luas objek sengketa, akan tetapi hanya mempermasalahkan tentang hak kepemilikan atas tanah tersebut saja, sehingga sangat beralasan

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk tidak melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa.

Dengan demikian, dapatlah dikatakan pemeriksaan setempat itu hanyalah sebagai keterangan bagi hakim untuk memperoleh kepastian dan kejelasan tentang objek yang disengketakan para pihak, apakah diperlukannya pemeriksaan setempat atau tidak, semua tergantung penilaian pembuktian hakim di persidangan sebelumnya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pengaturan bagaimana pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat, tidak ada diatur secara lengkap dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, baik itu dalam HIR, Rbg, KUH Perdata, maupun dalam Rv sendiri. Akan tetapi walaupun begitu, dalam prakteknya, pemeriksaan setempat ini adalah hukum acara yang harus dilalui dalam pembuktian dalam perkara perdata, jika terjadi ketidakjelasan objek perkara khususnya terhadap objek perkaranya berupa barang tidak bergerak atau tanah.

Kalau Penulis cermati, Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 Rv, pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan hal sebagai berikut :

a. Oleh Hakim Karena Jabatannya

Hakim karena jabatannya, secara *ex officio* dapat menetapkan atau memerintahkan diadakan pemeriksaan setempat, apabila hal itu dianggapnya

penting untuk mengetahui secara pasti keadaan yang berkenaan dengan objek gugatan.

Sehubungan dengan itu, hakim perlu memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Apabila dari hasil proses persidangan Majelis Hakim menilai bahwa mengenai batas-batas, ukuran dari objek perkara masih kabur, antara objek gugatan yang digugat oleh penggugat berbeda dengan objek yang dikuasai oleh tergugat, sangat tepat dan beralasan melaksanakan penggarisan yang telah ditentukan dalam SEMA untuk melakukan pemeriksaan setempat, guna menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi Putusan di kemudian hari, karena tak jarang dalam prakteknya pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanah yang menjadi objek perkara tidak sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan, seperti pada tanah objek perkara tersebut telah dikuasai oleh orang laian atau pihak ketiga.

Selanjutnya apabila berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, tentang letak, luas dan batas-batas dari objek perkara tidak menimbulkan keraguan bagi hakim, maka hakim karena jabatannya pula berwenang untuk tidak melakukan pemeriksaan setempat.

Sehubungan dengan kewenangan hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat, kapan sebaiknya pemeriksaan setempat itu dilakukan, belum juga ada kesatuan pendapat diantara Majelis Hakim, apakah sebelum masuk acara

pembuktian, atau sesudah semua pembuktian dilakukan. Masing-masing Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang berbeda.

Bagi hakim yang melaksanakan pemeriksaan setempat sebelum masuk kepada pembuktian, mereka beralasan bahwa dengan dilakukannya pemeriksaan setempat sebelum masuk pembuktian, Majelis Hakim akan mendapat gambaran atau akan membantu dalam menentukan letak, batas atau ukuran, luas dari tanah objek perkara, apabila dalam suatu gugatan antara batas-batas dan lokasi dari objek sengketa berbeda dengan batas-batas dan lokasi yang dibantah oleh tergugat dalam eksepsinya, sehingga dengan dilakukan pemeriksaan setempat sebelum masuk pembuktian, akan memudahkan Majelis Hakim dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh penggugat sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam dalil gugatannya dan membuktikan dalil bantahan dari tergugat³.

Bagi Majelis Hakim yang melaksanakan pemeriksaan setempat setelah dilakukannya atau selesainya acara pembuktian, mereka beralasan, bahwa dengan adanya pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dapat memastikan apakah objek perkara yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan fakta di lapangan, begitupun sebaliknya, pihak tergugat yang membantah dalil gugatan penggugat dalam pembuktian di persidangan, dapat pula membuktikan di

³Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Ennid Hasanuddin**, sekarang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

sidang lapangan, bahwa objek perkara yang digugat oleh penggugat adalah milik sah dari pihak tergugat⁴.

Kemudian sejauh mana kewenangan hakim menetapkan atau memerintahkan pemeriksaan setempat, tidak hanya terbatas pada hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), dapat juga oleh hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) dan hakim Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung). Jadi, pengertian hakim karena jabatannya, meliputi hakim secara instasional. Seperti Putusan Mahkamah Agung No. 274 K/Sip/1976⁵, yang menyatakan :

“Dalam perkara ini, hakim tingkat kasasi memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan setempat. Dikatakan, oleh karena judex factie, belum memeriksa tanah objek gugatan, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan setempat yang disertai dengan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) ”.

Begitu juga dalam Putusan MA No. 436 K/Sip/1974⁶. Dalam perkara ini pun Tingkat Kasasi memerintahkan Pengadilan Negeri mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah terperkara.

Kalau kita lihat dari kedua Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan kembali Pengadilan Negeri untuk dilakukannya pemeriksaan setempat, nampak adanya sikap kehati-hatian Mahkamah Agung sendiri dalam memutus perkara, agar terhadap perkara yang telah mempunyai *kekuatan hukum yang tetap*, dapat dilakukan eksekusi dengan lancar tanpa ada halangan.

⁴Wawancara dengan **Dinahayati Sofyan**. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal (Sekarang Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar).

⁵Tanggal 25-4-1979, **Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia II**, *Hukum Perdata dan Acara Perdata*, Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hlm. 306.

⁶Tanggal 30-3-1978, *Ibid*.

Kemudian, kalau kita kaji lebih mendalam tentang SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat tersebut, bagi Majelis Hakim yang sedang memeriksa objek perkara yang menyangkut tanah diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat, namun tentang kewajiban ini juga tidak diikuti dengan sanksi bagi Majelis Hakim yang tidak melaksanakan pemeriksaan setempat itu.

b. Atas Permintaan Para Pihak

Cara yang kedua, atas permintaan para pihak. Atas permintaan salah satu pihak maupun atas permintaan bersama kedua belah pihak, dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Hak para pihak ini ditegaskan dalam Pasal 211 Rv, bahwa atas permintaan para pihak, dapat diadakan pemeriksaan setempat.

Permintaan itu dapat diajukan salah satu pihak apabila pihak lawan membantah kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah objek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan yang pasti, sangat penting dilakukan pemeriksaan setempat. Disamping itu, dikabulkan atau tidaknya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat tersebut adalah wewenang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974, No. 612 K/Sip/1973, yang menyatakan :
“Dikabulkannya tidaknya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat adalah wewenang Judex Factie”

Berkaitan dengan wewenang *judex factie* untuk melakukan pemeriksaan setempat tersebut, Pengadilan Tinggi sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung dalam rangka pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan

yang ada dibawahnya, dalam berbagai kesempatan atau acara, seminar, pelatihan teknis, selalu menghimbau kepada Majelis Hakim yang sedang menyidangkan perkara perdata menyangkut masalah tanah, agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap perkara yang bersangkutan, tanpa melihat adanya atau tidak adanya permintaan pemeriksaan setempat dari para pihak yang berperkara. Langkah ini diambil tidak lain untuk mengantisipasi timbulnya kesalahan objek perkara dalam eksekusi nantinya⁷.

Namun, kewenangan Majelis Hakim dalam menentukan dilakukannya pemeriksaan setempat tersebut, akan menemui hambatan atau kendala apabila salah satu pihak (Penggugat) meminta dilakukan pemeriksaan setempat, akan tetapi pihak lain (Tergugat) tidak mau dilakukan pemeriksaan setempat. Dalam kasus ini, penolakan yang dilakukan oleh penggugat ini bermakna pengingkaran melaksanakan kewajiban yang diperintahkan hukum acara kepadanya. Dan menurut Pasal 214 ayat (2) Rv, kepada pihak yang menolak dilaksanakan pemeriksaan setempat itu dapat dijadikan fakta di persidangan yang dapat dijadikan alasan untuk merugikan kepentingannya. Selain itu, penolakan dilakukannya pemeriksaan setempat oleh salah satu pihak, juga akan menjadi kendala dalam hal mengenai biaya untuk melakukan pemeriksaan setempat tersebut. Misalnya, penggugat yang mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan setempat, dan penggugat mau membayar panjar pemeriksaan setempat tersebut, akan tetapi belum mencukupi dari biaya panjar pemeriksaan setempat yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, sedangkan tergugat sudah jelas

⁷ Makalah yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dalam Rapat Kerja hakim-Hakim dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Brastagi, 20-22 April 2009.

tidak mau melakukan pemeriksaan setempat, maka permintaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dapat dilakukan karena ketidak adaan biaya tersebut.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 214 Rv, apabila hakim yang memerintahkan pemeriksaan setempat, hakim menentukan, siapa yang harus membayar biaya panjar terlebih dahulu. Misalnya hakim menetapkan pembayaran panjar kepada penggugat terlebih dahulu, akan tetapi penggugat menolak untuk membayar panjar

Jika kita merujuk kepada ketentuan Pasal 160 ayat (2) HIR, jika yang diperintahkan atau kedua belah pihak enggan membayar biaya pemeriksaan setempat, maka pemeriksaan setempat tidak dapat dilakukan.

Mengenai bagaimana tentang pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam ketentuan Pasal 211 Rv sampai Pasal 214 Rv, pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut dapat dilaksanakan :

1. Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dituangkan dalam Putusan

Mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat, didasarkan atas perintah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, baik itu oleh hakim sendiri karena jabatannya, maupun karena atas permintaan para pihak yang berperkara.

Dalam Pasal 211 Rv lebih tegas ditentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat diadakan berdasarkan Putusan, baik atas permintaan para pihak maupun oleh hakim karena jabatannya.

Dalam prakteknya, penguasaan perintah melaksanakan pemeriksaan setempat itu, semuanya dilakukan atas perintah secara lisan saja oleh Majelis Hakim di persidangan. Misalnya ketika hakim karena jabatannya atau atas permintaan para pihak di persidangan, memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat, maka setelah ada kesepakatan antara para pihak dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan tentang kapan akan dilaksanakannya pemeriksaan setempat tersebut, termasuk menentukan besarnya biaya panjar yang harus dibebankan kepada para pihak untuk pemeriksaan setempat tersebut, maka pemeriksaan setempat itu baru dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, tanpa harus didahului adanya Penetapan atau Putusan Sela yang dikeluarkan oleh Hakim, dan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat itu biasanya dilakukan secara komplet oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, kecuali ada salah seorang Anggota Majelis Hakim yang berhalangan hadir, dan tidak menutup kemungkinan juga pemeriksaan setempat tersebut hanya dilakukan oleh salah seorang Majelis Hakim yang menyidangkan perkara berdasarkan Penetapan oleh Ketua Majelis Hakim dengan disertai oleh seorang Panitera.

Kemudian menurut ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, penguasaan perintah dilaksanakannya pemeriksaan setempat tersebut tidak ada ditentukan secara tegas bagaimana bentuk perintah pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, apakah dalam bentuk Putusan atau Penetapan. Namun dalam Pasal 211 Rv, perintah penguasaan dalam bentuk Putusan secara tegas ditentukan, yang dalam Putusan tersebut haruslah memuat :

a. Penunjukkan waktu pelaksanaan pemeriksaan setempat

Dalam Putusan tersebut, terdapat nama pejabat yang bertindak sebagai pelaksana yang terdiri dari paling tidak salah seorang Hakim anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dalam HIR dan Rbg, hakim anggota yang ditunjuk menjadi pelaksana pemeriksaan setempat disebut Komisaris. Dikatakan, untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, dapat diangkat satu atau dua orang Komisaris yang terdiri dari seorang Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan setempat itu, Anggota Majelis Hakim harus didampingi oleh seorang Panitera yang bertugas untuk membuat berita acara pemeriksaan setempat. Kemudian dalam Pasal 211 Rv, dalam pemeriksaan setempat dapat diikutkan seorang ahli, namun tidak bersifat mutlak, karena yang mutlak hanya Anggota Majelis Hakim dan Panitera, sedang ahli bersifat insidentil. Tergantung pada kebutuhan dan keadaan. Jika dianggap perlu, dalam Putusan Sela dapat dimasukkan seorang atau beberapa orang ahli sesuai dengan objek barang sengketa. Misalnya ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diperlukan dalam hal untuk mengetahui berapa luas keseluruhan dari tanah yang menjadi objek perkara, dalam hal objek perkaranya berupa perkebunan yang sangat luas mencapai ribuan hektar⁸.

Terlepas dari penggarisan pasal-pasal yang dikemukakan, dibolehkan juga pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim secara komplet.

⁸Wawancara dengan **Irwan Effendi Nasution**, Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

b. *Berisi perintah yang harus diperiksa*

Dalam Putusan sela memuat harus dideskripsikan secara jelas dan rinci seperti memeriksa lokasi, ukuran, dan batas-batasnya atau jumlah atau kualitasnya, bagaimana keadaan dari objek perkara tersebut, dan apa saja yang ada diatas tanah objek perkara tersebut. Hal ini harus disebut satu persatu hal-hal yang harus diperiksa dan dinilai mengenai keadaan barang objek perkara. Prinsipnya, hasil yang ingin dicapai dalam pemeriksaan setempat tersebut adalah agar dapat ditemukan fakta yang terang, pasti dan defenitif mengenai barang objek perkara. Berarti untuk mencapai hasil yang demikian, harus ditegaskan apa saja yang mesti diperiksa dan dinilai dari pemeriksaan setempat tersebut.

c. *Dihadiri Para Pihak*

Seperti yang dijelaskan, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya tempat persidangnya yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya objek perkara. Oleh karena itu, secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat.

Jadi persidangan pemeriksaan setempat harus diberitahu secara resmi kepada para pihak. Kalau hal itu sudah dilakukan, kemudian yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang sah, sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari yang tidak hadir berdasarkan Ketentuan Pasal 127 HIR.

Dengan demikian, sebagai syarat formil, sidang pemeriksaan setempat harus dihadiri oleh para pihak. Namun apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak tersebut. Pemeriksaan tidak boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak, jika ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah. Disamping itu dalam prakteknya, setiap akan dilakukan pemeriksaan setempat, sebelumnya juga diberitahukan kepada Kepala Desa atau Kepala Kampung dimana objek perkara itu terletak.

Dalam pemeriksaan setempat tersebut, hakim karena jabatannya dapat juga memanggil kembali saksi-saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri untuk mendukung dalam memberi kejelasan atau kepastian tentang objek perkara yang disengketakan.

d. Datang ke Tempat Barang / Objek Terletak

Proses pemeriksaan setempat mesti dilangsungkan di tempat lokasi barang itu terletak. Pejabat atau Hakim yang diangkat atau ditunjuk datang langsung di tempat barang yang hendak diperiksa terletak, kemudian setelah sampai di tempat, hakim yang memimpin pemeriksaan, membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat, dan kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta yang memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing.

Jadi tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana layaknya di ruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata

tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang pemeriksaan setempat.

e. Panitera Membuat Berita Acara

Sebagaimana halnya persidangan biasa, sidang pemeriksaan setempat harus dituangkan dalam berita acara, yang disebut berita acara pemeriksaan setempat. Yang bertugas membuatnya adalah Panitera. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 211 Rv ayat (2). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 186 HIR, yang menegaskan :

- Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan.
- Berita acara ditandatangani oleh Hakim dan Panitera.
- Jika hakim atau panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.

Hal yang tidak kalah penting, bahwa Panitera harus membuat bentuk gambar dari tanah yang menjadi objek perkara, baik itu bentuk gambar objek perkara menurut versi Penggugat, maupun dari versi Tergugat, karena hal ini akan memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim dalam menilai pembuktian para pihak nantinya.

f. Membuat Akta Pendapat

Hal ini diatur dalam Pasal 211 ayat (1) Rv. Selain Panitera membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat, hakim yang ditugaskan melaksanakan,

diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Untuk membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta pendapat tersebut harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta itu adalah Berita Acara itu sendiri.

Ahli yang dimaksudkan disini, bisa saja dari BPN, misalnya untuk melakukan pengukuran terhadap tanah/objek tanah terperkara agar dapat diketahui pasti berapa luas dari objek perkara tersebut, dalam hal objek perkaranya berupa tanah yang luas, sedangkan untuk objek / tanah perkaranya tidak begitu luas, maka dapat dilakukan pengukuran sendiri oleh panitera atau petugas juru sita pengadilan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Pendelegasian Wewenang Pemeriksaan Setempat

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 180 ayat (3) Rbg dan Pasal 213 Rv, mengatur pendelegasian pelaksanaan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri yang lain. Apabila pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, disebabkan objek barang itu terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri dimaksud, pemeriksaan dilimpahkan kepadanya. Pelimpahan itu, sesuai prinsip atau patokan yuridiksi relatif yang dimiliki setiap Pengadilan Negeri, hanya terbatas dalam daerah hukumnya, harus dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan jalan

mendelegasikan kepadanya. Sistem merupakan aturan yang bersifat tata tertib beracara yang harus dipenuhi oleh setiap Pengadilan Negeri.

Dalam pendelegasian pelaksanaan pemeriksaan setempat ini sering terjadi kendala dalam pelaksanaannya. Untuk ini harus komitmen yang sama antara Pengadilan Negeri yang satu dengan Pengadilan Negeri yang lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut.

Misalnya, untuk kasus yang lain, dalam hal penyampaian relaas panggilan dengan melakukan pendelegasian dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal kepada Pengadilan Negeri Medan, dalam hal para pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Mandailing Natal bukan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, akan tetapi berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, untuk laporan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal, apakah relaas panggilan tersebut telah sampai kepada para pihak atau apakah panggilan tersebut telah benar-benar dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Medan, seringkali terlambat sampai ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga hal ini akan menghalangi bagi Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan⁹.

3. Biaya Pemeriksaan Setempat

Mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv dan Peneliti temui dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Mandailing Natal sesuai dengan patokan sebagai berikut :

⁹Hasil Pengawasan Hakim Tinggi Sumatera terhadap Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dalam 2 (dua) periode pemeriksaan).

a. Dibebankan Kepada Pihak yang Berperkara

Patokan yang pertama, siapa yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban :

- Membayar panjar biaya pemeriksaan.
- Dan biaya itu dibayar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.

Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut Pasal 121 ayat (1) HIR, yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera, penggugat harus lebih dahulu membayar panjar biaya perkara.

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, akan tetapi atas perintah hakim secara *ex officio*, maka beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya. Dapat dipikulkan kepada penggugat dan tergugat.

Namun dalam hal ini, hakim sedapat mungkin realistis sesuai dengan asas kepatutan. Tidak patut hakim membebankannya kepada kepada pihak ekonomi lemah. Oleh karena itu, selain bertitik tolak dari asas yang dianggap paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat, maka urutan pertama yang layak dibebani oleh hakim adalah penggugat. Akan tetapi, jika tergugat secara nyata berada dalam pososi ekonomi yang kuat dianggap beralasan untuk membebankan kepada tergugat.

Tentang hal ini perlu diingat kembali ketentuan Pasal 160 ayat (2) HIR. Jika pihak yang dibebani enggan atau tidak mau membayar, pelaksanaan

pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan. Hal ini pernah terjadi praktek di dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pembuktian di persidangan, majelis hakim yang menyidangkan perkara yang bersangkutan, memandang perlu dilakukannya pemeriksaan setempat untuk memastikan letak, batas-batas, ukuran dari tanah yang menjadi objek perkara, dan majelis hakim telah menentukan bahwasanya yang dibebankan untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat adalah dibebankan kepada kedua belah pihak, yaitu sebagian pihak penggugat dan sebagian pihak tergugat. Dan atas pembebanan tersebut, pihak penggugat telah membayar panjar biaya yang dibebankan kepadanya, sedangkan pihak tergugat tidak mau membayar biaya panjar pemeriksaan setempat yang dibebankan kepadanya. Dan setelah dilakukan beberapa pemanggilan, pihak tergugat tanpa memberikan alasan apapun tetap tidak mau memenuhi kewajibannya, sehingga pemeriksaan setempat tersebut tidak jadi dilakukan.

Komponen pokok menurut Pasal 214 Rv adalah ongkos jalan. Komponen inilah yang umum, yaitu biaya perjalanan pelaksanaan yang terdiri paling sedikit dua orang yang terdiri dari Hakim atau Panitera.

Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jarak antara Kantor Pengadilan Negeri dengan tempat letaknya barang. Dasar perhitungan adalah ongkos transportasi yang dapat dipergunakan ke tempat tersebut. Tetapi tidak mengurangi biaya saksi atau ahli jika memang ada.

Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian, perhitungan biaya panjar, meliputi juga ongkos yang diperlukan untuk itu sesuai dengan kewajaran. Jadi, besarnya biaya pemeriksaan setempat untuk satu perkara dengan perkara lain bisa saja berbeda.

B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT GUNA MENDUKUNG PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA

Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, secara yuridis formal, hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti, karena tidak termasuk alat bukti yang disebut Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUHPerdara, atau Pasal 283 Rbg. Oleh karena, tidak sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Dalam Putusan Hakim dalam perkara perdata, pemeriksaan setempat dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim sebagai :

1. *Sebagai keterangan bagi hakim.*

Baik Pasal 153 ayat (1) HIR, Pasal 180 ayat (1) Rbg, dan Pasal 211 Rv, menegaskan, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan keterangan bagi hakim.

Kalau begitu nilai kekuatan yang melekat padanya, hanya sebagai keterangan yang menjelaskan tentang kepastian defenitif atas barang yang disengketakan. Namun kalau sesuatu keterangan yang jelas dan defenitif dijadikan sebagai dasar pertimbangan, berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang yang bersangkutan. Dan oleh

karena keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan itu sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam mengambil Putusan.

Sehubungan dengan itu pada dasarnya, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil Putusan. Tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak. Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya. Walaupun begitu, dalam prakteknya kita dapat melihat kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam pembuktian perkara perdata, antara lain:

2. *Variabel Nilai Kekuatannya dalam Putusan Pengadilan*

Kalau diperhatikan variabel kekuatan mengikatnya sidang pemeriksaan setempat dalam suatu Putusan pengadilan, yang kita temui, antara lain :

a. Hasil Pemeriksaan Setempat Dapat Dijadikan Dasar Pertimbangan.

Prinsip ini bertitik tolak dari kebebasan hakim untuk menilainya, karena patokan yang dipergunakan bukan mesti atau wajib dijadikan sebagai dasar pertimbangan, tetapi dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim. Dalam arti, pemeriksaan setempat tersebut dapat saja sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan, yang tentunya juga harus didukung dengan alat bukti yang lain. Pendapat itu antara lain

dikemukakan dalam Putusan MA No. 1497 K/Sip/1983¹⁰. Menurut

Putusan ini :

“Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevant, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah tersebut sebagai akibat dari peralihan hak milik atas pemegang tanah semula kepada pemilik baru.

b. Dapat Dijadikan Dasar Mengabulkan Gugatan dan Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.

Dalam hal dalil gugatan tentang luasnya tanah dibantah tergugat, dan kemudian ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sama luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, dalam kasus seperti itu hasil pemeriksaan setempat dimaksud, dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengabulkan gugatan. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 3197 K /Sip/1983¹¹, yang berpendapat :

“Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan”.

Ternyata yang dikabulkan sama dengan *posita* dan *petitum* yang kebetulan sama pula dengan hasil pemeriksaan setempat, sehingga tidak melanggar asas *ultra petitum partium* yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR.

¹⁰Tanggal 20-12-1984, Jo PT. Semarang No. 455/1981, 29-11-1982, Jo PN Pemalang No. 36/1980, 15-6-1983.

¹¹Tanggal 9-2-1985 Jo PT. Padang No. 166/1980, 15-6-1983, Jo PN Padang No. 128/1978, 3-3-1980.

c. Dapat Digunakan Untuk Menentukan Luas.

Daya mengikat yang lain, hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek tanah perkara. Sifat daya kekuatannya memang tidak mutlak, tetapi fakultatif yakni dapat. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 1777 K/Sip/1983¹², dikatakan bahwa :

“Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah perkara. Sehubungan dengan itu judex factie berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah perkara”.

Seperti juga telah disinggung diatas, Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, ditempat objek perkara dapat memerintahkan juru sita dari pengadilan untuk melakukan pengukuran terhadap objek perkara, dan apabila objek perkara itu luas, maka pemeriksaan setempat dapat melibatkan petugas dari BPN. Dengan adanya pengukuran terhadap objek perkara, maka Majelis Hakim dapat menilai, apakah objek perkara tersebut telah sesuai dengan yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil gugatannya, atau apakah objek perkara tersebut telah sesuai dengan yang didalilkan oleh tergugat dalam bantahannya yang mengklaim bahwa tergugatlah yang memiliki objek perkara tersebut. Karena seperti diketahui bahwa apabila objek perkara yang didalilkan oleh penggugat tidak jelas atau kabur, akan mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila

¹²Tanggal 17-1-1985 Jo PT Medan No. 161/1981, 23-3-1982, Jo PN. P. Sidempuan No. 50/1980, 14-10-1980.

penggugat dapat membuktikan objek perkara tersebut adalah miliknya dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat tersebut telah sesuai dengan yang didalilkan dalam gugatannya, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis hakim yang menyidangkan perkara.

C. KENDALA-KENDALA YANG SERING DIHADAPI DALAM PEMERIKSAAN SETEMPAT

Sebelum dilakukan pelaksanaan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim sendiri maupun Panitera hendaknya mempersiapkan diri secara matang, karena tidak jarang di lapangan nantinya, akan ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, , diantaranya sebagai berikut :

1. Masalah personil yang melaksanakan pemeriksaan setempat, khususnya tidak adanya Ahli untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut.

Secara umum, pengertian Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Pengangkatan seorang ahli di persidangan, didasarkan pada keahliannya di bidang perkara yang disengketakan, bukan karena disebabkan pengalaman, penglihatan atau pendengarannya mengenai perkara yang sedang diperiksa. Alasan pokok pengangkatannya menurut Pasal 154 ayat (1) HIR, karena masih terdapat hal-hal yang belum jelas, dan satu-satunya cara yang dianggap dapat memperjelasnya, hanya berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang benar-benar kompeten member opini atau

pendapat mengenai kasus yang diperkarakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya¹³.

Dalam persidangan, cara pengangkatan ahli dalam Pasal 174 ayat (1) HIR, Pasal 215 Rv dapat dilakukan dengan dengan dua cara, yaitu Oleh hakim secara *Ex Officio* dan atas permintaan Salah Satu Pihak.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat, dalam hal objek perkara yang disengketakan itu luasnya mencapai puluhan ribu hektar, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal tentang kejelasan batas-batas dan luas objek perkara, tanpa dilibatkan adanya Ahli atau Petugas yang berkompeten dalam melakukan pengukuran terhadap objek perkara, seperti dari Petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dari Hasil Penelitian Peneliti selama ini di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dari seluruh perkara perdata dari tahun 2006 sampai tahun 2009, khususnya terhadap objek perkaranya berupa tanah dan untuk memastikan luas dan batas-batas dari objek perkara, belum sekalipun melibatkan saksi Ahli untuk membantu dan mendukung pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut.

2. Masalah keamanan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat.

Masalah keamanan dalam melaksanakan pemeriksaan setempat sangat berperan untuk menentukan berhasil atau tidaknya pemeriksaan setempat tersebut. Yang sering Peneliti temui di lapangan, bahwa antara pihak

¹³Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 792.

penggugat dan pihak tergugat sama-sama membawa massa pendukungnya, yang bisa mengganggu jalannya proses persidangan lapangan tersebut. Dan tidak jarang massa pendukung para penggugat dan pihak tergugat ini bertindak anarkis yang bisa mengancam keselamatan dari petugas yang melaksanakan pemeriksaan setempat.

Kendala ini sebenarnya bisa dihindari, dengan cara mengikutkan dan meminta bantuan pengamanan dari Aparat Kepolisian setempat. Akan tetapi kembali kepada masalah klasik, bahwa untuk meminta bantuan pengamanan tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit pula, yang mana biaya tersebut akan diperhitungkan dari biaya pemeriksaan setempat yang telah dianggarkan oleh para pihak penggugat dan tergugat.

3. Sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara.

Tidak jarang pula objek perkara yang disengketakan itu terletak di daerah pelosok pedesaan yang terpencil atau di daerah perbukitan, sehingga akses jalan ke tempat objek perkara sangat sulit sekali untuk ditempuh.

BAB V

PENUTUP

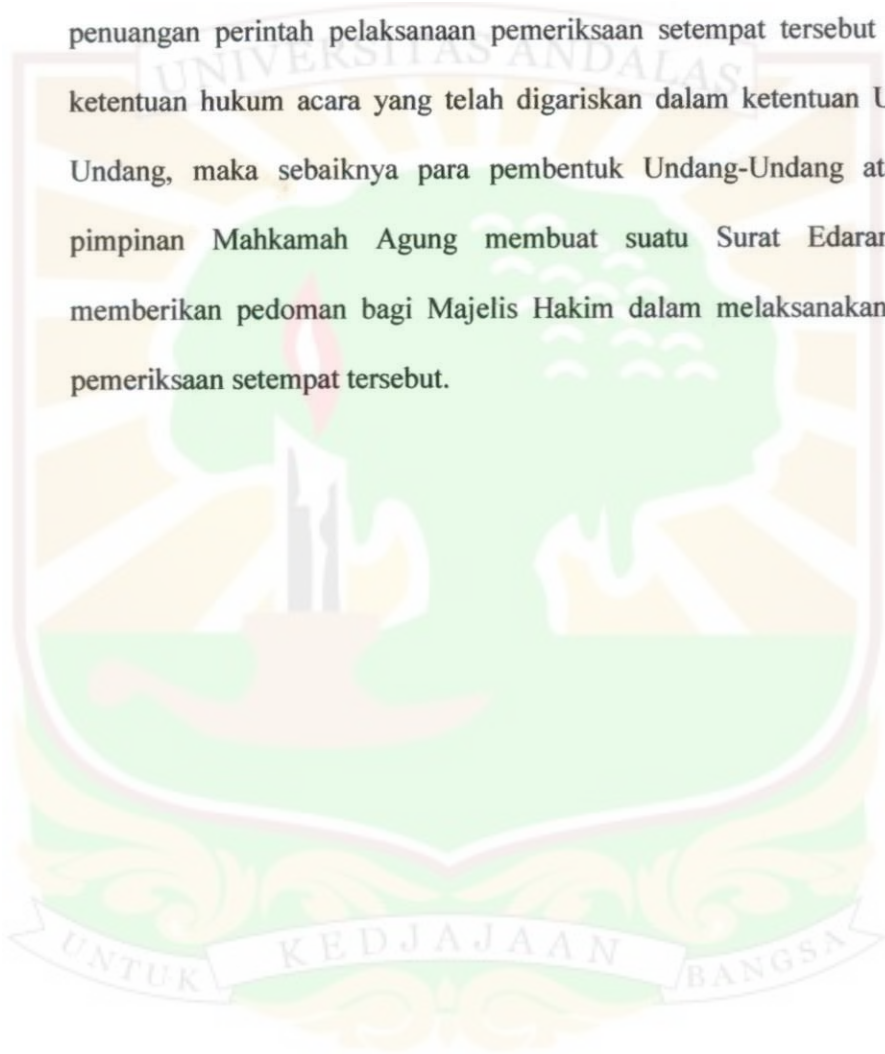
A. KESIMPULAN

1. Pemeriksaan setempat bisa dilakukan dan bisa saja tidak dilakukan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, semua tergantung kepada pertimbangan hakim berdasarkan pembuktian di persidangan, apakah dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setempat untuk membuat jelas tentang keadaan, lokasi, batas dan ukuran dari objek barang sengketa, dan perintah pelaksanaan untuk pemeriksaan setempat tersebut dituangkan dalam Putusan Sela yang berisikan tentang penunjukkan seorang hakim Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dan kemudian juga harus dideskripsikan secara jelas dan rinci tentang hal-hal yang harus diperiksa, dan pemeriksaan setempat tersebut haruslah dihadiri oleh para pihak, Panitera membuat Berita Acara, atau Akta Pendapat (jika dipandang perlu).
2. Bahwa pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai keterangan tambahan bagi hakim, dan dalam Putusan pengadilan, pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim, dasar untuk mengabulkan gugatan atau menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima, dan dasar untuk menentukan luas.
3. Dalam pemeriksaan setempat, tidak jarang ditemui kendala-kendala diantaranya, masalah personil dalam melaksanakan pemeriksaan setempat,

tanpa melibatkan saksi Ahli, masalah keamanan, dan sulitnya akses jalan menuju ke tempat objek perkara.

B. SARAN-SARAN

1. Karena ada perbedaan dalam antara teori dan prakteknya tentang penuangan perintah pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut dengan ketentuan hukum acara yang telah digariskan dalam ketentuan Undang-Undang, maka sebaiknya para pembentuk Undang-Undang atau pun pimpinan Mahkamah Agung membuat suatu Surat Edaran yang memberikan pedoman bagi Majelis Hakim dalam melaksanakan proses pemeriksaan setempat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amin, SM**, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.1976.
- Budiarto, Agus**. *Kedudukan dan tanggung Jawab Hakim*, Bogor, Ghalia.
- Djazuli, Bachar**, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Akademika Pressindo.
- Harahap, Krisna**, *Hukum Acara Perdata : Mediasi, Class Action Arbitrase & Alternatif*, Grafiti, Bandung, 2008.
- Harahap, M. Yahya**, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Offset, Cetakan Kedua, 2005.
- Harahap, M. Yahya**, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Harahap, M. Yahya**, *Hukum Acara Peradilan Indonesia*, Medan.
- Mertokusumo, Sudikno**, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Muhammad, Abdulkadir**, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1992.
- Pitlo**, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta.
- Putusan M.A.**, 15 Maret 1972 No. 549 K/Sip/1971, *Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972..*
- Rubini dan Chidir Ali**, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974.

Rubini dan Chidir Ali, *Yurisprudensi tentang Hukum Acara Pembuktian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1974.

Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1985.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Binacipta, 1977.

Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor, Politeia.

Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Fasco Jakarta, 1958.

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Yakarta, 1993.

Tesna, *Komentat atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR*, Pradnya Paramita Yakarta, 1970.

Jurnal / Makalah-Makalah

Makalah Varia Peradilan, dari beberapa Tahun Penerbitan, IKAHI.

Makalah yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada Rapat Kerja Daerah bagi Hakim-Hakim dalam Lingkungan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Brastagi bulan April 2009.

www.hukumonline

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / Burgelijke Wetboek (BW)

Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (B.Rv)

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG)

Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA).





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Forci Nilpa Darma, SH.
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 30 Oktober 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal
Alamat : Jln. Kampung Baru No. 56 RT 05 RW IV
kelurahan Sawahan Timur Kec. Padang
Timur Kab. Mandailing Natal

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 43 Lubuk Alung : Tahun 1987 – Tahun 1993
2. SLTPN 5 Lubuk Alung : Tahun 1993 – Tahun 1996
3. SMUN 1 Lubuk Alung : Tahun 1996 – Tahun 1999
4. Sarjana (S 1) Unand : Tahun 1999 – Tahun 2003

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS